PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN KELAS IB

EDISI TAHUN 2025

LAPORAN
Pelaksanaan Kegiatan
2025

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

A Year of Progress, Integrity & Service Excellence

- CERITA DARI **GARIS DEPAN** LAYANAN
- REFLEKSI 2025 :
  "MENGUKIR KEADILAN, MERAJUT PELAYANAN"
  DALAM MEWUJUDKAN PENGADILAN BERMARTABAT



SOROTAN UTAMA

CAPAIAN KINERJA,
INOVASI LAYANAN, DAN
TRANSFORMASI DIGITAL

999
PERKARA TUNTAS

3,93
INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT
KATEGORI "SANGAT BAIK"

Jalan Pasir Panjang KM 5,5
Kumpai Batu Atas, Kec. Arut Selatan
Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
https://pa-pangkalanbun.go.id

TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN KELAS IB

TA UN 2025

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025
hadir melalui proses kolaborasi serta komitmen kuat seluruh
Aparatur Pengadilan Agama Pangkalan Bun.



Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB

Jalan Pasir Panjang KM 5,5 Kumpai Batu Atas, Arut Selatan,
Kab. Kotawaringin barat, Kalimantan Tangah
https://pa-pangkalanbun.go.id

Halaman ini mempersembahkan para penyusun yang telah bekerja di balik layar untuk memastikan laporan ini tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif dan selaras dengan arah pembangunan peradilan modern.

PENANGUNG JAWAB

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.
(Ketua PA Pangkalan Bun)

PENGARAH

Syahrul Ramadhan, S.H.I.
(Wakil Ketua PA Pangkalan Bun)

KOORDINATOR PELAKSANA DAN SUBSTANSI

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.
Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Abdurahman Sidik, S.H.I.
(Hakim Pada PA Pangkalan Bun)

SEKRETARIS TIM

Muhamad Nor Kifli, S.H.I. (Panitera)
Hj. Noor Inayah, S.H. (Sekretaris)

ANGGOTA DAN PELAKSANA TEKNIS

Rini, S.H. (Kasubag Kepegawaian Dan Ortala)
Tofiin, S.H.I., M.H. (Panitera Muda Hukum)
Rieska Prahesthy (Plt. Kasubag Umum dan Keuangan)
Inggar Pratiko, S.Kom (Plt. Kasubag PTIP)

STAFF PENDUKUNG

Staff Bagian Kepaniteraan
dan Kesekretariatan



Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB

"Berintegritas• Kompak • Bermartabat"

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat, Taufik dan Hidayah Nya, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah SWT berupa nikmat sehat, nikmat umur dan Alhamdullilah atas Ridho-Nya jualah sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB yang merupakan uraian dari semua pelaksanaan program-program kerja Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB selama satu Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Di dalam laporan ini tergambar semua aktivitas dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB, baik tugas pokoknya sebagai Badan Peradilan yang memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan, maupun sebagai tugas penyelenggara administrasi, baik Administrasi Perkara maupun Administrasi Umum.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini, disajikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi kegiatan kerja tahun 2025 dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas dan intensitas kerja secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan terciptanya cita-cita badan peradilan yang court of law demi tegaknya supremasi hukum di Negara Indonesia.

Dalam penyusunan Laporan ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data dan fakta, namun kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itulah, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan tahunan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah, kami berserah diri dan kepada semua pihak yang membantu penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih.

Pangkalan Bun, 31 Desember 2025
Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H.

PESAN KETUA PENGADILAN



“Integritas bukan hanya nilai, melainkan perilaku yang harus tampak dalam setiap proses pelayanan”

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Ketua Pengadilan Agama
Pangkalan Bun Kelas IB

Pengadilan adalah tempat orang mencari keadilan. Namun lebih dari itu, pengadilan adalah tempat orang mencari ketenangan. Tahun 2025 mengokohkan tekad kami untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih manusiawi, dan lebih akuntabel.

Melalui peningkatan SDM, penguatan tata kelola, modernisasi layanan serta kerja sama lintas lembaga, kami berupaya menjaga kepercayaan publik. Capaian ini bukan semata hasil kinerja aparatur, tetapi juga dukungan masyarakat dan arahan lembaga peradilan di atasnya.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

04 PENGANTAR
Memuat kata pengantar laporan dan pesan Ketua Pengadilan yang berisi ringkasan tujuan penyusunan laporan, gambaran umum kinerja tahun 2025, apresiasi kepada seluruh pihak, serta penegasan komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, integritas, dan profesionalitas aparatur

06 DAFTAR ISI
Susunan lengkap bagian-bagian dalam laporan untuk memudahkan navigasi pembaca

08 RINGKASAN EKSEKUTIF
Ikhtisar keseluruhan laporan yang memuat inti capaian, sorotan kinerja, dan informasi strategis

09 KILAS BALIK KEGIATAN 2025
Rangkaian peristiwa penting sepanjang tahun yang menggambarkan perjalanan organisasi

10 REFLEKSI 2025 : "Mengukir Keadilan, Merajut Pelayanan"
Evaluasi singkat mengenai keberhasilan, tantangan, dan pembelajaran sepanjang tahun kinerja

12 2025 DALAM ANGKA
Penampilan data kinerja utama dalam bentuk statistik dan infografis

14 TENTANG PENGADILAN
Gambaran umum profil kelembagaan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Nilai-nilai organisasi yang menjadi dasar budaya kerja dan pelayanan, Informasi mengenai visi, misi, struktur organisasi, dan tugas pokok Pengadilan Agama

DAFTAR ISI
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

18 BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan laporan

24 BAB II KEADAAN PERKARA
Menguraikan latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan laporan

33 BAB III SUMBER DAYA MANUSIA
Menguraikan latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan laporan

40 BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Menguraikan latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan laporan

57 BAB V PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK
Menguraikan latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan laporan

64 BAB VI PENGAWASAN
Menguraikan latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan laporan

67 BAB VII PENUTUP
Menguraikan latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan laporan



RINGKASAN EKSEKUTIF 2025

Overview

Tahun 2025 menjadi momentum transformasi bagi Pengadilan Agama Pangkalan Bun.. Sepanjang tahun, satuan kerja meneguhkan komitmen menghadirkan layanan peradilan yang lebih mudah diakses, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat. Melalui penguatan budaya kerja, optimalisasi teknologi, serta peningkatan kualitas layanan publik, berbagai capaian strategis berhasil diraih dengan hasil yang terukur

Goals and Objectives

KEADAAN PERKARA

- Pola penanganan perkara menunjukkan tren penyelesaian yang stabil.
- Penerapan standar layanan berbasis digital, monitoring real-time dan pemanfaatan dashboard perkara menjadi tulang punggung percepatan proses bisnis, khususnya pada layanan prioritas seperti e-court dan e-litigation.
- Implementasi E-AC sebagai salah satu Layanan Digitalisasi Peradilan.

SUMBER DAYA MANUSIA

tahun 2025 diwarnai upaya serius penguatan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, monev kinerja serta penyempurnaan sistem layanan internal. Peran pimpinan menjadi sentral dalam membangun ekosistem kerja kolaboratif yang mendorong inovasi sekaligus menjaga integritas aparatur.

KUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TI

Bidang keuangan, sarpras dan teknologi informasi mengalami peningkatan signifikan. Optimalisasi anggaran berjalan lebih akuntabel dan Penguatan keamanan data dan integrasi layanan TI turut menjadi fokus penting dalam mendukung aktivitas harian.

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik memperoleh sorotan positif sepanjang tahun. Pengembangan ruang layanan terpadu, layanan ramah kelompok rentan dan peningkatan akses informasi memperkuat posisi satuan kerja sebagai pengadilan yang responsif dan informatif.

PENGAWASAN

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pendekatan preventif dan edukatif diterapkan sehingga kualitas tata kelola dan kepatuhan semakin meningkat.

Key Findings and Recommendations

Memasuki tahun berikutnya, Pengadilan Agama Pangkalan Bun mengusung agenda prioritas: peningkatan kualitas SDM, modernisasi layanan, literasi digital, penguatan integritas, serta perluasan akses keadilan bagi masyarakat. Dengan fondasi kinerja 2025, satuan kerja optimistis melangkah menuju pengadilan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima.

"Tahun 2025 menjadi momentum konsolidasi pelayanan, penguatan teknologi informasi, dan akselerasi reformasi layanan publik di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Berikut rangkaian peristiwa utama sepanjang tahun."

KILAS BALIK KEGIATAN 2025

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

January - Maret 2025
(Fondasi Kinerja Awal Tahun)

- Kick-Off Meeting Awal Tahun, Penegasan arah kebijakan dan target kinerja 2025
- Audit Internal SOP : Penyelarasan kembali SOP layanan dan administrasi

April - Juni 2025
(Penguatan Layanan)

- Pelaksanaan Sidang Keliling / Sidang di Luar Gedung, Dilaksanakan di wilayah-wilayah terpencil untuk memperluas akses keadilan.
- Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan.
- Peningkatan Kompetensi Aparatur.

Juli - September 2025
(Percepatan Kinerja)

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan layanan, tingkat penyelesaian perkara, dan identifikasi kendala teknis.
- Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik:
- Kolaborasi Program Layanan dengan Instansi Terkait

Oktober - November 2025
(Inovasi, Pengawasan dan Persiapan Akhir Tahun)

- Pengawasan/Pemeriksaan pengelolaan perkara, keuangan, dan pelayanan publik.
- Perbaikan dokumen, penyempurnaan SOP, dan peningkatan akuntabilitas.
- Finalisasi laporan kinerja, identifikasi kebutuhan anggaran 2026, dan penyusunan strategi perbaikan.
- Evaluasi Layanan

Desember 2025
(Penyelesaian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan)

- Evaluasi Kinerja Akhir Tahun
- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025
- Penyerahan Laporan kepada Pimpinan dan Instansi Terkait
- Refleksi Akhir Tahun

REFLEKSI 2025
“Mengukir Keadilan, Merajut Pelayanan”

Dalam Mewujudkan Pengadilan Bermartabat

Tiga Pelajaran Utama 2025 :

- Keadilan harus menembus jarak
- Pengalaman pelayanan adalah pusat reformasi
- Modernisasi bukan pilihan, tetapi kewajiban

Refleksi tahun 2025 menunjukkan bahwa pelayanan peradilan membutuhkan keberanian untuk berubah dan keteguhan untuk memperbaiki diri. Pengadilan Agama Pangkalan Bun terus berupaya menghadirkan keadilan yang lebih mudah diakses, lebih transparan dan lebih responsif.

Dengan langkah-langkah modernisasi, penguatan SDM, inovasi digital, serta penguatan pelayanan berbasis masyarakat, kami memasuki tahun 2026 dengan energi baru.

Kami percaya : Pengadilan yang baik bukan hanya memutus dengan benar, tetapi juga melayani dengan benar.



Cerita Dari Garis Depan Layanan



POTRET SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
Di Kec. Kotawaringin Lama

"Keadilan bukan hanya perkara putusan, tetapi bagaimana ia hadir bagi mereka yang membutuhkan."

Program sidang di luar gedung menghadirkan wajah peradilan yang lebih dekat, cepat, dan menjangkau mereka yang kesulitan mengakses layanan di kantor pengadilan.

Potret tersebut merekam komitmen kami untuk bergerak melampaui batas ruang sidang dan menghadirkan kepastian hukum langsung di tengah masyarakat.

Melalui perjalanan ke desa-desa hingga titik layanan terpencil, kami memastikan bahwa akses keadilan bukan hanya janji, tetapi pengalaman nyata bagi mereka yang membutuhkan.

PERFORMANCE OVERVIEW

2025 DALAM ANGKA

1016
Total Perkara ditangani

100%
Perkara Diputus Tepat Waktu

17
Sisa Perkara

100%
Layanan Pos Bantuan Hukum

100%
(20 Kegiatan)
Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung

3,93
Tingkat Kepuasan Layanan

98,83%
Realisasi Anggaran DIPA 01 (402437)

99,39%
Realisasi Anggaran DIPA 04 (402438)

20
Raihan Prestasi Kinerja Tahun 2025

79
Indeks Profesional ASN Satuan Kerja Kategori Sedang

80
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

3,05
Indikator Pengelolaan Aset

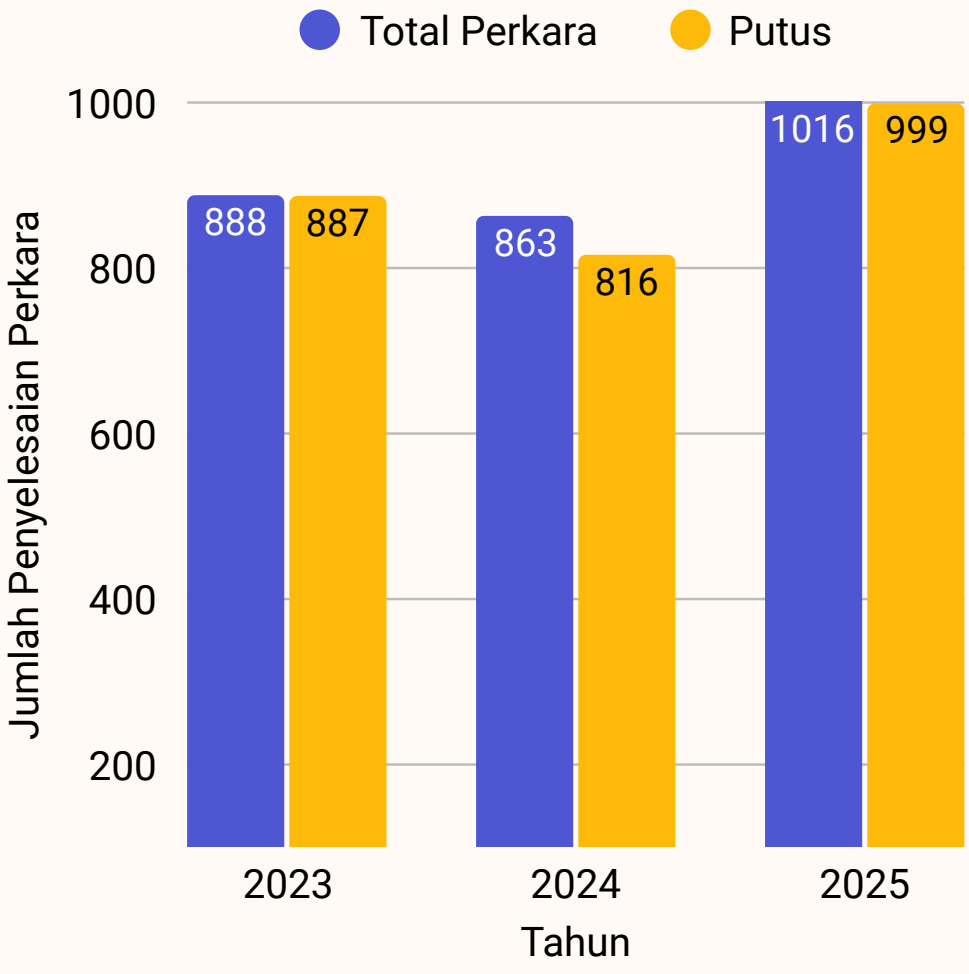
"Setiap angka adalah jejak kerja 365 hari seluruh aparatur Pengadilan Agama Pangkalan Bun"



YEAR IN REVIEW 2025

2025 menjadi tahun percepatan, konsolidasi, dan inovasi bagi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Seluruh unsur kesekretariatan dan kepaniteraan bergerak bersama menghadirkan layanan yang lebih cepat, humanis, dan akuntabel. Tahun ini ditandai dengan peningkatan performa layanan, modernisasi sarana, serta komitmen kuat terhadap integritas.

Tren Penyelesaian Perkara



▲ 1,5%

Persentase penyelesaian perkara memiliki tren relatif stabil dalam tiga tahun terakhir, meskipun terjadi peningkatan jumlah perkara pada 2025. Kinerja penanganan perkara terjaga berkat penguatan koordinasi, monitoring berkala, dan pemanfaatan teknologi pendukung

TENTANG Pengadilan Agama Pangkalan Bun

“Wajah Peradilan Agama di Gerbang Barat Kalimantan Tengah”

Pengadilan Agama Pangkalan Bun merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan kewenangan peradilan Islam di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdiri sejak 10 Januari 1977, lembaga ini tumbuh dari ruang pelayanan sederhana hingga kini menempati gedung modern yang representatif di Jalan Pasir Panjang KM 5,5 Kumpai Batu Atas, Pangkalan Bun



Mandat dan Yurisdiksi

Dengan yurisdiksi enam kecamatan di Kotawaringin Barat, Pengadilan Agama Pangkalan Bun menangani perkara perkawinan, waris, ekonomi syariah, dan sengketa keluarga Islam lainnya. Dari wilayah yang dulu sulit dijangkau, lembaga ini telah menjadi garda terdepan dalam menghadirkan akses keadilan hingga ke pelosok.

Perjalanan Transformasi

Sejak awal berdirinya, PA Pangkalan Bun terus melakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan publik. Reformasi melalui sistem satu atap memperkokoh profesionalisme aparatur, sementara digitalisasi layanan mempercepat proses peradilan dan mendekatkan akses bagi pencari keadilan.

Layanan Berintegritas dan Humanis

Mengusung nilai BERKOBAR (Berintegritas, Kompak, Bermartabat), PA Pangkalan Bun berkomitmen menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan responsif. Dari ruang sidang hingga meja pelayanan, setiap proses diarahkan untuk memberi pengalaman peradilan yang ramah, pasti, dan dapat dipercaya

Melayani untuk Keadilan

Dengan semangat modernisasi dan peningkatan kualitas SDM, Pengadilan Agama Pangkalan Bun terus berupaya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat Kotawaringin Barat—bukan hanya melalui putusan, tetapi melalui pelayanan publik yang memberi kepastian, kenyamanan, dan kepuasan.

FONDASI KINERJA : ↗

Visi, Misi & Core Value Pengadilan Agama Pangkalan Bun

VISI

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Pangkalan Bun Yang Agung”

MISI

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
- Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan kepada Pencari Keadilan.
- Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengadilan Agama Pangkalan Bun Yang Jujur, Profesional, berintegritas dan Bertanggung Jawab.
- Mewujudkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Agama Pangkalan Bun.



Core Values ↗

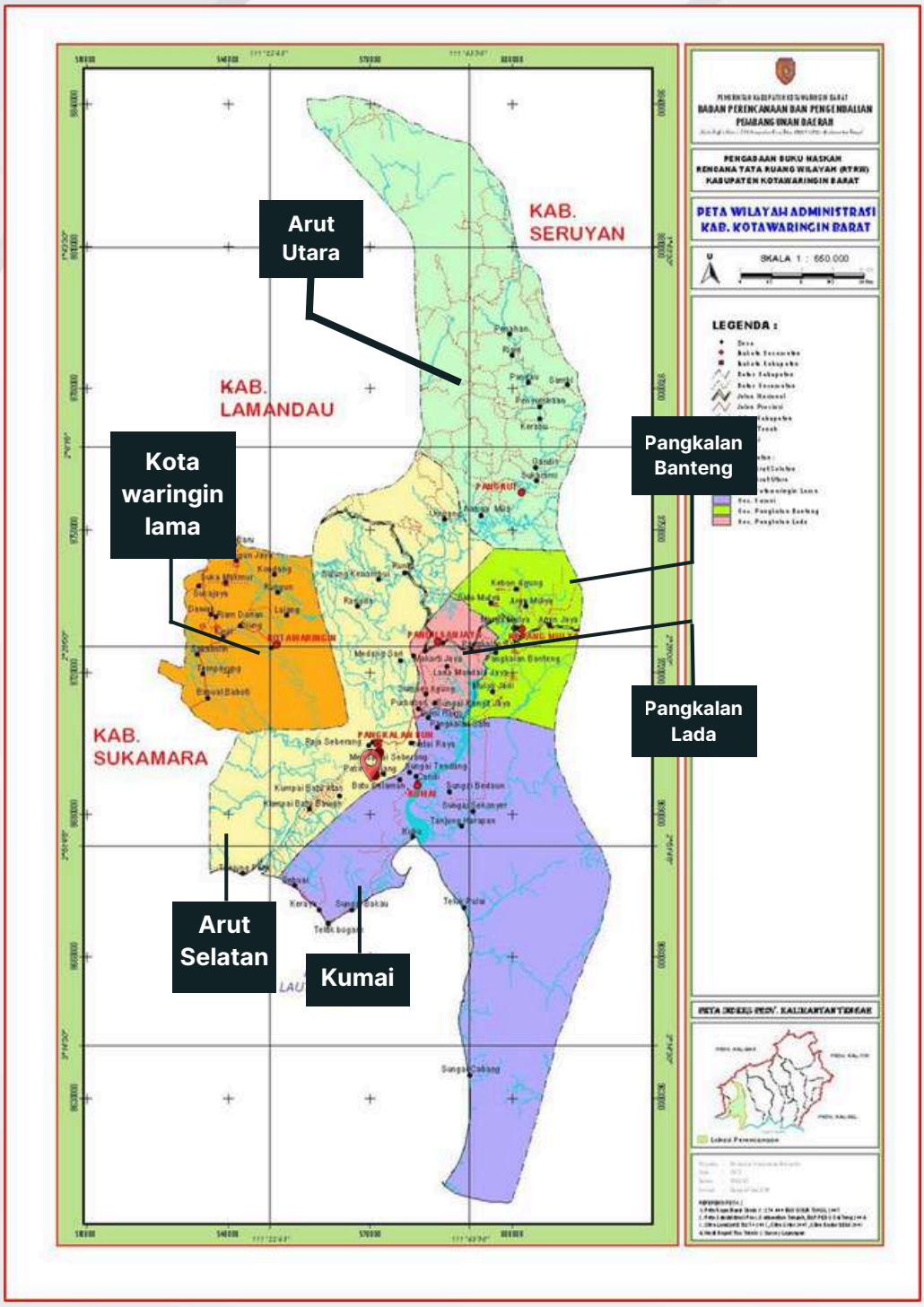
Pengadilan Agama Pangkalan Bun “BERKOBAR”

- **BERINTEGRITAS**
  Berperilaku jujur, transparan dan dapat dipercaya dalam setiap pelaksanaan tugas, memastikan setiap layanan dan putusan sesuai prinsip keadilan serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan

- **KOMPAK**
  Membangun kerja sama yang solid antar-pegawai, saling mendukung dalam penyelesaian tugas, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis demi layanan peradilan yang optimal.

- **BERMARTABAT**
  Menjaga kehormatan lembaga melalui sikap profesional, pelayanan yang humanis, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur peradilan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

WILAYAH YURIDIKSI
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN



Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun kelas IB meliputi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan luas wilayah 10.759 km2 dengan kepadatan penduduk berkisar diangka 26 Jiwa/km2, memiliki 6 (Enam) Kecamatan. Kabupaten Kotawaringin Barat secara astronomis berada pada posisi 111°37'32,9" Bujur Timur dan 2°44'39,6" Lintang Selatan

Dengan rincian sebagai berikut:
1) Kecamatan Arut Selatan dengan 7 Kelurahan dan 13 Desa;
2) Kecamatan Kumai dengan 3 Kelurahan dan 15 Desa;
3) Kecamatan Pangkalan Banteng dengan 17 Desa ;
4) Kecamatan Pangkalan Lada dengan 11 Desa;
5) Kecamatan Arut Utara dengan 1 Kelurahan dan 10 Desa;
6) Kecamatan Kotawaringin Lama dengan 2 Kelurahan dan 15 Desa

WAJAH KEPEMIMPINAN
Pengadilan Agama Pangkalan Bun



H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.
Ketua



Syahrul Ramadhan, S.H.I.
Wakil Ketua



Muhamad Nor Kifli, S.H.I.
Panitera



Hj. Noor Inayah, S.H.
Sekretaris

"Kepemimpinan di peradilan bukan sekadar mengatur, tetapi memastikan keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat."
~ Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI 2012–2020) ~

BAB I
PENDAHULUAN

"Memulai Cerita Perjalanan Pelayanan dan Pengabdian"

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025



PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Peradilan Agama

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan Peradilan, guna menegaskan keadilan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan sebagai berikut :

- Kekuasaan Kehakimana di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi Agama.
- Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

KEWENANGAN AWAL (UU 7/1989, PS 49)

Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama antara sesama Muslim dalam bidang :

- Perkawinan
- Kewarisan, wasiat, hibah
- Wakaf dan sadaqah
- Zakat dan infaq



> “Peradilan Agama hadir untuk menyelesaikan sengketa keluarga dan syariah secara adil, cepat dan sederhana.”

PERLUASAN KEWENANGAN : UU NO. 3/2006

Perubahan besar bagi Peradilan Agama yaitu penambahan kewenangan Ekonomi Syariah.

Fondasi Hukum Peradilan Agama

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, untuk menegakkan hukum dan keadilan.





“Peradilan Agama
Adalah Pilar Keadilan
Bagi Masyarakat
Muslim Indonesia”

B. STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi)

Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana terurai dalam pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.



SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA

(Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009)

1. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama sebagai unsur pimpinan.
2. Hakim Pengadilan sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan Kehakiman.
3. Panitera dan Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama.

Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dan dibantu 3 Panitera Muda yakni :

Panitera Muda Gugatan.
Panitera Muda Permohonan.
Panitera Muda Hukum.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 3 Kepala Sub Bagian yakni :

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (Kosong)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Kosong)

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama sebagai penegak hukum dan keadilan serta pembentuk hukum dalam pelaksanaannya dijabarkan :

- Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya;
- Memeriksa perkara sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;
- Mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Memberikan fatwa Agama dan memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal Awal bulan tahun Hijriyah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN (Perma No. 7 Tahun 2015)



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN
TAHUN 2025

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktifitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat dapat dipahami bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang dapat menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.



"Hukum bekerja melalui prosedur dan SOP membantu memastikan bahwa keadilan hadir bukan hanya dalam putusan, tetapi juga dalam prosesnya."

-- Prof. Satjipto Rahardjo --
(Bapak Hukum Progresif Indonesia)

FUNGSI & MANFAAT SOP

Melalui SOP, variasi yang tidak perlu dalam pelaksanaan tugas dapat dihindari.
Hasilnya adalah proses yang lebih efisien, minim kesalahan dan mampu mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.
SOP memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar, transparan serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.

PERAN SOP DI PENGADILAN AGAMA

Dalam menjalankan fungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB telah menyusun berbagai SOP yang mendukung seluruh unit teknis dan nonteknis. SOP tersebut menjadi **kompas kerja bagi seluruh aparatur dalam memberikan layanan peradilan yang profesional dan berintegritas**.

Distribusi SOP di Pengadilan Agama Pangkalan Bun :

BIDANG KESEKRETARIATAN



33

BIDANG KEPANITERAAN

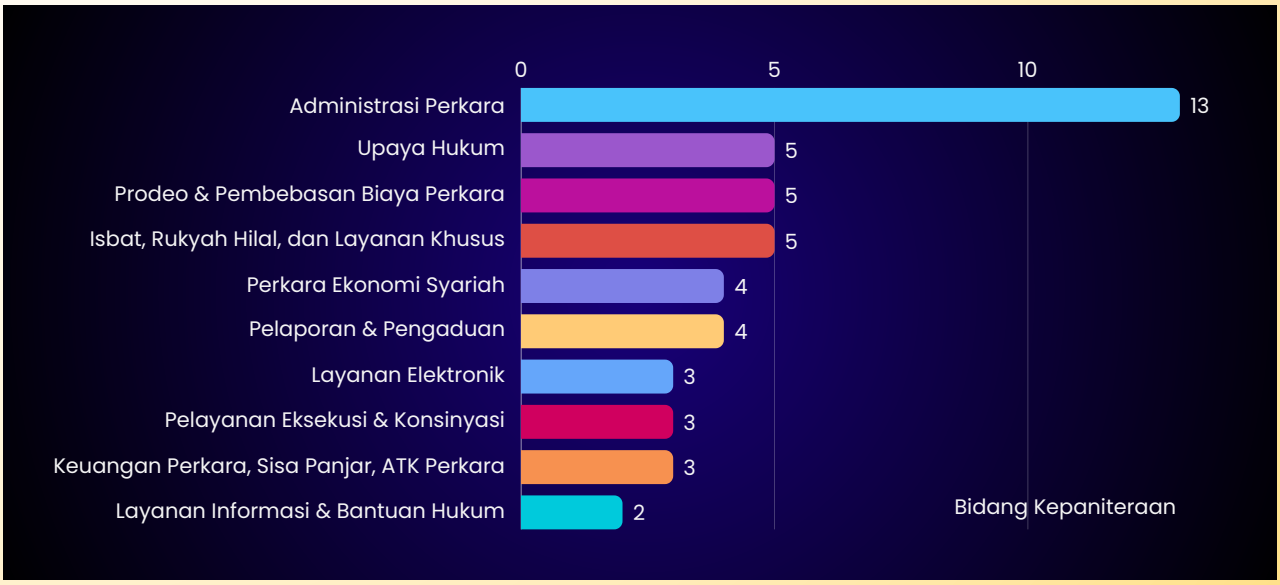
76



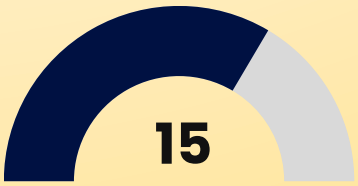
TOTAL KESELURUHAN

109

Pemetaan Bidang Pengendali Mutu melalui SOP :



BIDANG KESEKRETARIATAN



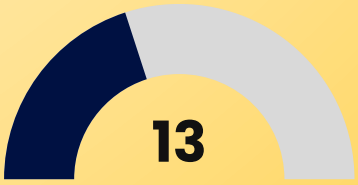
15

Kepegawaian Dan Ortala



5

PTIP



13

Umum dan Keuangan

"Pemetaan 109 SOP menunjukkan komitmen PA Pangkalan Bun membangun tata kelola yang terukur dan akuntabel, dengan distribusi SOP yang tertata antara Kesekretariatan dan Kepaniteraan sebagai fondasi mutu layanan."

DAFTAR SOP
Pengadilan Agama Pangkalan Bun

2025

No	Jabatan / Unit Kerja	Jumlah SOP	Ringkasan Isi SOP
1	Ketua	4	Penetapan Majelis, Penetapan Hari Sidang, Sidang di Luar Gedung, Pelayanan Posbakum.
2	Hakim	5	Persiapan Persidangan, Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, Pemeriksaan Saksi, Administrasi Persidangan.
3	Panitera	6	Penunjukan Panitera/PP/JS, Pemeriksaan Setempat, Teguran Panjar, Pelayanan Sidang Keliling.
4	Panmud Permohonan	1	Itsbat Nikah Volunter.
5	Panmud Gugatan	1	Penundaan Sidang.
6	Panmud Hukum	10	Penyerahan Produk, Akta Cerai, Salinan Putusan, Arsip Perkara, Surat Kuasa Khusus, Pengiriman Putusan ke KUA/DUKCAPIL.
7	Jurusita / JSP	2	Pemanggilan Para Pihak, Pemanggilan Saksi.
8	Meja I–III	28	Penerimaan Perkara, Mediasi, Biaya Perkara, Pengiriman Putusan, Ekonomi Syariah, Banding, Kasasi, PK, Prodeo, Eksekusi, Konsinyasi, Perceraian ASN/TNI/Polri, dan layanan teknis lainnya.

DAFTAR SOP
Pengadilan Agama Pangkalan Bun

2025

No	Jabatan / Unit Kerja	Jumlah SOP	Ringkasan Isi SOP
9	Sekretaris	9	Manajemen Risiko, Kendali Dokumen, Kendali Arsip, Tinjauan Manajemen, Survey Kepuasan, Tindakan Perbaikan.
10	Kasubag PTIP	4	Rencana Program & Anggaran, SAKIP, Pelaporan, Pengelolaan TI.
11	Kasubag Umum & Keuangan	13	Tata Naskah, Administrasi Surat, Arsip, Aset, Persediaan, Kehumasan, Perpustakaan, Informasi, PNBP, Anggaran & Keuangan.
12	Kasubag Kepegawaian & Ortala	32	Pengembangan SDM, Izin Belajar, Cuti, Absensi, KGB, KP, Pensiun, Penilaian Pegawai, Delegasi Wewenang, Penghargaan, LHKPN/LHKASN, serta administrasi kepegawaian lengkap.
13	Bendahara Pengeluaran	1	SOP Bendahara Pengeluaran.
14	PPID / Layanan Informasi	3	Layanan Informasi, Pelaporan, Pengaduan.
15	Kasir / Keuangan Perkara	6	Penerimaan Perkara, Pembayaran Panjar, Pengembalian Panjar, ATK Perkara, Keuangan Perkara, Sisa Panjar.
16	Unit Posbakum	1	SOP Layanan Posbakum.

BAB II
KEADAAN PERKARA DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

"Memahami Perkara, Meneguhkan Prioritas."

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025







KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA 2025

"Sebuah Tahun Dinamis dalam Penegakan Keadilan"

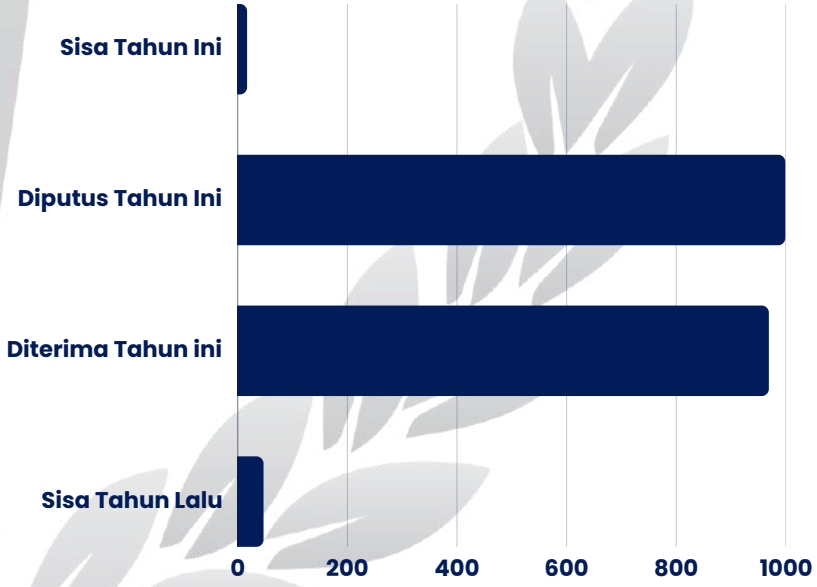
Dengan total **969 perkara diterima/Masuk selama tahun 2025**, Pengadilan Agama Pangkalan Bun memasuki tahun yang penuh dinamika. Dari jumlah tersebut, **883 merupakan perkara gugatan** dan **87 perkara permohonan**. Sementara **47 perkara sisa tahun 2024 terdiri dari 44 Perkara Gugatan dan 3 Perkara Permohonan** ikut menambah beban kerja awal tahun.

Hasilnya, total perkara yang harus ditangani pada 2025 mencapai 1016 perkara. Melalui kerja kolaboratif seluruh unsur pimpinan, hakim hingga aparatur pendukung, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berhasil memutus 999 perkara, menyisakan 17 perkara pada akhir tahun sebagai *carry-over* untuk 2025.

1. Keadaan Perkara Tahun 2025

No	Sisa Tahun Lalu	Masuk Perkara	Putus Perkara	Sisa Perkara
1	47	969	999	17

GrafikRekap Perkara
Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2025
(Perkara Masuk vs Putus vs Sisa Perkara)



DATA HIGHLIGHT

1016
Perkara Ditangani

999
Perkara Diputus

98,32%
Tingkat Penyelesaian

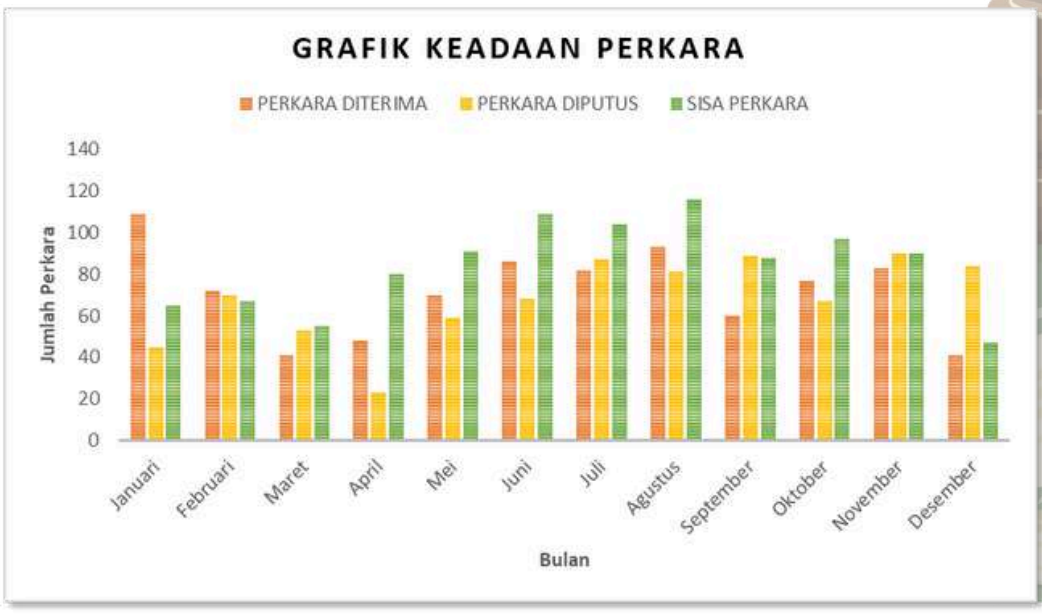
17
Sisa Perkara Tahun 2025

JUMLAH PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS PER BULAN

Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2025

BULAN	Perkara Diterima	Perkara Diputus	Sisa Perkara
Januari	139	40	146
Februari	112	96	162
Maret	52	78	136
April	95	53	178
Mei	91	89	180
Juni	77	105	152
Juli	67	89	130
Agustus	92	49	173
September	64	101	136
Oktober	78	81	136
November	58	78	133
Desember	44	140	17
Total	**969**	**999**	**17**

Grafik Keadaan Perkara Tahun 2025
(Perkara Masuk vs Putus vs Sisa Perkara)



2. Keadaan Perkara Banding

Dalam Tahun 2025 Pengadilan Agama Pangkalan Bun menerima perkara yang diajukan banding sebanyak 3 perkara dan putus sebanyak 3 perkara sehingga sisa perkara di akhir Tahun 2025 sebanyak 0 Perkara.

No	Sisa Tahun Lalu	Masuk Perkara	Putus Perkara	Sisa Perkara
1	0	3	3	0

3. Keadaan Perkara Kasasi

Dalam Tahun 2025 Pengadilan Agama Pangkalan Bun terdapat perkara yang diajukan Kasasi sebanyak 2 perkara dengan tidak ada sisa perkara kasasi tahun lalu. Adapun perkara putus di tahun 2025 sebayak 2 Perkara Kasasi sehingga sisa perkara di akhir Tahun 2025 sebanyak 0 Perkara.

No	Sisa Tahun Lalu	Masuk Perkara	Putus Perkara	Sisa Perkara
1	0	2	2	0

4. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Dalam Tahun 2025 Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak terdapat perkara yang diajukan untuk peninjauan kembali (PK).

No	Sisa Tahun Lalu	Masuk Perkara	Putus Perkara	Sisa Perkara
1	0	0	0	0

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sampai dengan 31 Desember 2025 Pengadilan Agama Pangkalan bun menerima sebanyak 969 perkara, terdiri dari 87 perkara permohonan dan 883 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara Tahun 2024 yang belum putus sebanyak 47 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama Tahun 2025 berjumlah 1016 perkara dengan rincian sebagai berikut :

GrafikRekap Perkara Masuk Dan Putus Tahun 2025



2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Penyelesaian perkara/diputus pada Tahun 2025 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebanyak 1016 perkara. Penyelesaian perkara/diputus secara tepat waktu (diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan) berjumlah 999 perkara. Sedangkan penyelesaian perkara/diputus secara tepat waktu (diselesaikan lebih dari 5 bulan) berjumlah 0 Perkara.

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Penyelesaian perkara/diputus pada Tahun 2025 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun berjumlah 1016 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang tidak diajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) berjumlah 1011 perkara. Sedangkan perkara yang diajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) berjumlah 5 perkara.

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Salah satu amanah dari PERMA No. 1 tahun 2016 yakni mewajibkan proses mediasi dalam penanganan perkara. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama.

Di samping itu, mediasi sudah menjadi bagiantak terpisahkan dari penyelesaian perkaraperdata di pengadilan Agama Sebagian besar perkara perdatayang apabila kedua belah pihak hadir pada waktu sidang, maka wajib melakukan mediasi oleh Hakim Mediator di sediakan oleh Pengadilan Agama sebelum diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. Namun apabila kewajiban mediasi tersebut tidak dilakukan dan diabaikan, maka amanah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, Putusan Pengadilan tersebut batal demi hukum.

Pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melakukan Mediasi sebanyak 72 perkara dari 1016 perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun, namun dari 72 perkara tersebut, sehingga tingkat keberhasilan perkara yang berhasil di Mediasi pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun berjumlah 47 Perkara, mediasi tidak berhasil 18 perkara, mediasi tidak dapat dilaksanakan 3 perkara dan mediasi yang masih berjalan 4 perkara.

5. JUMLAH PERKARAANAK YANG BERHASILMELALUI DIVERSI

Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada Tahun 2025 tidak ada perkaraanak yang berhasilmelalui diversi.

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses kepengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek procedural hukum.

Maka Mahkamah Agung menggagaskan adanya POSBAKUM. Posbakum merupakan usaha Mahkamah Agung untuk menyentuh kalangan terbawah yakni masyarakat awam hukum dan mereka yang tidak mampu membayaruntuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetap dapat beracara di Pengadilan Agama, khususnya sebagai fasilitas berperkara prodeo, bukan fasilitas gratis bercerai, tetapi diberikan hanya kepada yang butuh bantuan saja.

Karena itu POSBAKUM Sebagai bagian dari program *justice for all* selain fasilitas prodeo dan sidang di luar gedung, dapat menjadi indikator pembaruan MA, bahkan mengangkat martabat MA di mata internasional.

Salah satu wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang membentuk Pos Bantuan Hukum, yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Dari total anggaran Posbakum sebesar Rp. 60.000.000,- telah direalisasikan sebesarRp. 60.000.000,- (100 %) dan sisa sebesar Rp. 0,- (0 %).

2. SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN / PELAYANAN TERPADU



Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain terkadang sulit untuk dijangkau, jarak antara Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan Kabupaten/Kota tempat pengadilan agama juga terkadang sangat jauh diperparah dengan kondisi jalan yang sulit untuk menjangkau pengadilan agama.

Atas dasar kondisi inilah, pemerintah melakukan program peningkatan manajemen peradilan agama dengan menyediakan kegiatan Sidang di luar gedung yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Lada dan Kotawaringin lama.

Sidang di luar gedung adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang dalam wilayah hukumnya akan tetapi dilaksanakan diluar gedung pengadilan, pelaksanaaan sidang di luar gedung atau sidang diluar gedung pengadilan ini merupakan upaya bantuan hukum yang dilaksanakan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan yang bisa mereka terkendala dengan kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Sidang di luar gedung di Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebesar Rp. 66.000.000,-.

Dari total anggaransebesar Rp. 66.000.000,- dan target yang ditetapkan, telah terealisasi sebesar Rp. 66.000.000 (100%) dan sisa sebesar Rp. 0,- (0 %) dengan capaian kinerja 21 Kegiatan dengan menyelesaikan 100 perkara melebihi target perkara yang dianggarkan.







3. PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)

Pada dasarnya hukum acara di pengadilan dalam perkara perdata dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftar di kepaniteraan setelah Pemohon/Penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar biaya perkara atau persekot. Namun biaya tersebut harus juga seringan mungkin, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Khususnya masyarakat berekonomi lemah, sesuai dengan asas hukum acara, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara, juga tentu harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepadamasyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo).

Untuk membantu masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tergolong tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan Agama, telah tersedia alokasi anggaran sebesar Rp. 2.117.000,- dengan total target 6 perkara

Dari total anggaran sebesar Rp. 2.117.000,- dan target capaian yang telah ditetapkan, terealisasi sebesar Rp. 1.335.000,- (63,06%) dan sisa sebesar Rp. 782.000,- dengan capaian kinerja sebesar 7 perkara.

MAHKAMAH AGUNG

Realisasi Anggaran Untuk Program Prioritas

2025

Realisasi Anggaran POSBAKUM

RP. 66.000.000,-

Realisasi Anggaran SIDANG KELILING

RP. 60.000.000,-

Realisasi Anggaran PERKARA PRODEO

RP. 1.335.000,-



Program prioritas untuk akses keadilan terlaksana secara optimal, dengan Posbakum dan Sidang di Luar Gedung terealisasi penuh 100%, serta pembebasan biaya perkara (prodeo) terealisasi 63,06%. Capaian ini menegaskan komitmen pengadilan dalam memperluas layanan hukum yang inklusif, mudah diakses, dan berkeadilan bagi masyarakat.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

"Membangun Peradilan dari Kekuatan Manusia"

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025







SUMBER DAYA MANUSIA



A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

"Membangun Peradilan Modern Dimulai dari Kualitas SDM"

1. Profil Sumber Daya Manusia

Jumlah Pejabat / Pegawai dan Honorer Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada Tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 28 orang yang meliputi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial berjumlah 13 orang dan Non Teknis Yudisial berjumlah 15 orang.

Sebuah komposisi yang menegaskan keseimbangan antara kompetensi teknis yudisial dan profesional pendukung kesekretariatan. Mereka adalah fondasi utama yang memastikan roda pelayanan peradilan bergerak cepat, tepat, dan modern.

Total Pegawai : 28

64% Male

36% Female

Menurut Usia :

18–30 : 9
31–45 : 16
46–55 : 3

Menurut Status Perkawinan :

Menikah (17)
Belum Menikah (11)

Menurut Status Kepegawaian :

HAKIM (5 Orang)

PNS (16 Orang)

PPPK (7 Orang)

STRUKTUR INTI **TEKNIS YUDISIAL**

"Garda Terdepan Penegakan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama"

SDM Teknis Yudisial berjumlah 13 orang, terdiri dari unsur pimpinan, hakim sebanyak 3 orang, kepaniteraan 2 orang, serta tenaga kejurusitaan dan pendukung teknis sebanyak 6 orang.

DAFTAR TENAGA FUNGSIONAL HAKIM		
H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H. NIP. 19730711 200502 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Ketua / Hakim Madya Muda
SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. NIP. 19810716 200704 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua / Hakim Madya Muda
IMAM FAIZAL BAIHAQI, S.H., M.H. NIP. 19931112 201712 1 006	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya
OKTOGHAIZHA RINJIPIRAMA, S.H.I. NIP. 19921022 201712 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda
ABDURAHMAN SIDIK, S.H.I. NIP. 19900523 201712 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda
DAFTAR TENAGA FUNGSIONAL KEPANITERAAN		
MUHAMAD NOR KIFLI, S.H.I. NIP. 19881218 201212 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera
TOFIIN, S.H.I., M.H. NIP. 19870915 201903 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Muda Hukum
DAFTAR TENAGA KEJURUSITAAN DAN PELAKSANA		
BAGUS WIHENDRA NUR, S, A.Md. NIP. 19900403 202503 1 004	Pengatur (II/c)	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara
AUFA BASKORO AJI, S.H. NIP. 19950905 202505 1 001	Penata Muda (III/a)	Klerek-Analis Perkara Peradilan
MUHAMMAD NAUFAL NADA SILMA, S.H. NIP. 19990612 202505 1 001	Penata Muda (III/a)	Klerek-Analis Perkara Peradilan
MIFTAHUL AHDIYAT, A.Md. NIP. 20010707 202506 1 006	Pengatur (II/c)	CPNS - Dokumentalis Hukum
FAWWAS AUFAA TAQIYYAH PRASTIWI, S.H. NIP. 20010923 202506 2 018	Penata Muda (III/a)	CPNS - Analis Perkara Peradilan
TANIYA SETIARNI PUTRI, S.H. NIP. 20010417 202506 2 017	Penata Muda (III/a)	CPNS - Analis Perkara Peradilan

STRUKTUR **NON TEKNIS**

"Tulang Punggung Administrasi, Teknologi, dan Layanan Publik"

SDM Non Teknis Yudisial berjumlah 15 orang, meliputi sekretaris, kepala sub bagian 1 orang, pejabat fungsional 2 orang, staf dan PPPK

DAFTAR TENAGA KESEKRETARIATAN		
Hj. NOOR INAYAH, S.H. NIP. 19721016 199401 2 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris
R I N I, S.H. NIP. 19840722 200904 2 012	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag. Kepegawaian&Ortala
RIESKA PRAHESTHY NIP. 19860123 200912 2 006	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran
INGGAR PRATIKO, S.Kom. NIP. 19940327 202012 1 006	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pranata Komputer Ahli Pertama
SWAJI JUNIKHA, S.S.T. NIP. 19900616 202501 1 001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Terampil
DWIANA RACHMASARI, S.E. NIP. 19961001 202503 2 014	Penata Muda (III/a)	Klerek-Penelaah Kebijakan
KANYA KITRI, A.Md. NIP. 19950422 202503 2 005	Pengatur (II/c)	Klerek-Pengolah Data dan Informasi
ANIS WIJI ASTUTI, S.T. NIP. 19961021 202506 2 010	Penata Muda (III/a)	CPNS- Teknisi Sarana dan Prasarana
DAFTAR TENAGA PPPK		
AYU AMELIA, S.Pd. NIP.PPPK 199207232025212046	IX	Penata Layanan Operasional
TUNJUNG WIRASTOMO NIP.PPPK 198810062025211031	V	Operator Layanan Operasional
SARFANI NIP.PPPK 199407182025211031	V	Operator Layanan Operasional
ATTUR MUZI NIP.PPPK 197409142025211013	V	Operator Layanan Operasional
SUBHAN NIP.PPPK 198209022025211033	V	Operator Layanan Operasional
ROY IRAWAN, S.H. NIP.PPPK 199602052025211024	V	Operator Layanan Operasional
ARBANI NIP.PPPK 198606152025211062	V	Operator Layanan Operasional



2. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang menduduki Jabatan Struktural hanya jabatan sekretaris dan kasubag kepegawaian dan organisasi tatalaksana terisi namun Jabatan Fungsional masih banyak yang kosong meliputi :

A. JABATAN STRUKTURAL

Kekurangan Jabatan Struktural dan Staf meliputi :

- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masih (kosong)
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan masih (kosong)
- Staf Kesekretariatan.

B. JABATAN FUNGSIONAL

Kekurangan pegawai yang menduduki Jabatan fungsional, meliputi :

- Hakim seharusnya 10 orang untuk Pengadilan Agama Kelas IB yang ada 3 orang, masih kekurangan 7 orang.
- Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan masih kosong sampai saat ini.
- Panitera Pengganti masih kosong, seharusnya untuk Pengadilan Agama Kelas IB jumlah Panitera Pengganti 10 orang.
- Jurusita dan Jurusita Pengganti masih kosong sampai saat ini.

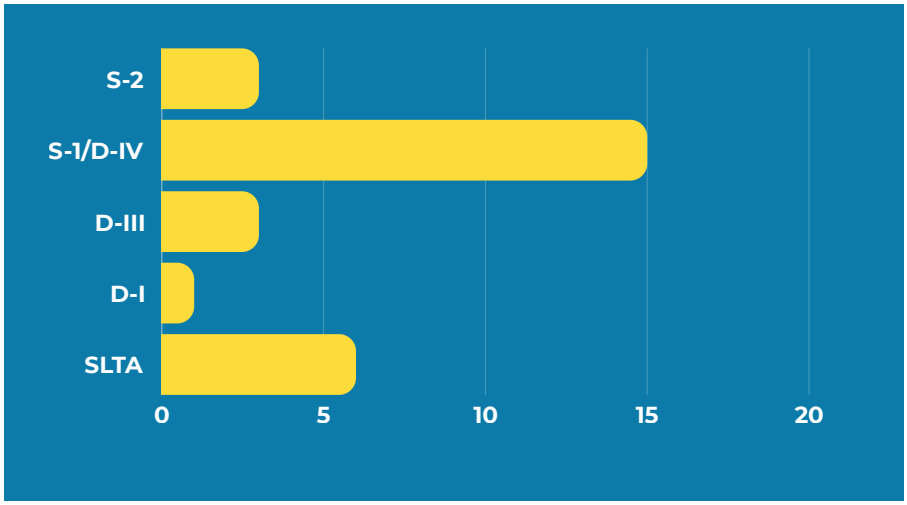
3. KOMPOSISI SDM

A. MENURUT PANGKAT/GOL.

Struktur kepangkatan SDM menunjukkan formasi yang solid di setiap level. Pada jenjang utama terdapat 2 pegawai IV/b dan 1 pegawai IV/a sebagai penggerak kebijakan. Kelompok golongan III menjadi mayoritas dengan komposisi 2 pegawai III/d, 1 pegawai III/c, 4 pegawai III/b, dan 7 pegawai III/a yang menopang kinerja harian. sementara pada golongan II tercatat 1 pegawai II/d dan 3 pegawai II/c, ditopang tambahan 7 pegawai PPPK yang memperkuat layanan operasional.

B. MENURUT PENDIDIKAN

Dari sisi pendidikan, SDM didominasi lulusan perguruan tinggi, terdiri dari 3 lulusan S2, 14 lulusan S1, serta 1 lulusan D-IV. Kompetensi teknis juga didukung oleh 3 lulusan D-III dan 1 lulusan D-I, sementara 6 lulusan SLTA melengkapi kekuatan operasional di lini pelayanan.



B. MUTASI

Mutasi selama tahun 2025 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagai berikut:

1. MUTASI MASUK :

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H. (NIP. 197307112005021001)
Pangkat/Golongan Ruang Penata Pembina Tingkat I (IV/b) dari Ketua Pengadilan Agama Sambas Kelas IB menjadi Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 89/KMA/SK.KP4.1.3/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I (NIP. 198107162007041001)
Pangkat/Golongan Ruang Penata Pembina Tingkat I (IV/b) dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Sambas Kelas IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 89/KMA/SK.KP4.1.3/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.

ABDURAHMAN SIDIK, S.H.I. (NIP. 199005232201712100 2)
Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dari Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh Kelas II menjadi Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 89/KMA/SK.KP4.1.3/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.

MUHAMAD NOR KIFLI, S.H.I. (NIP. 198812182012121002)
Pangkat/Golongan Ruang Penata Penata Tingkat I (III/d) dari Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menjadi Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1548/DJA/SK.KP4.1.3/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025.

TOFIIN, S.H.I., M.H. (NIP. 199308232019031004)
Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Nanga Bulik menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan SK Dirjen Badilag No. 2296/DJA/SK.KP4.1.3/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025.

2. MUTASI KELUAR :

H. Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I NIP.197506202000031004
Pangkat/Golongan Ruang Penata Pembina Utama Muda (IV/c) dari Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 89/KMA/SK.KP4.1.3/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.

Frislyasi, S.H.I. NIP. 197012051994012001
Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Berdasarkan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1547/DJA/SK.KP4.1.3/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025.

Segah Kusuma Dani, S.H. NIP. 198606062009121002
Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang Kelas II Berdasarkan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No 1504/DJA/SK.KP4.1.3/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025.

Azmi Fuadi, S.H. NIP. 198903102011011003
Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dari Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pulang Pisau Kelas II Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilag No : 822/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025.

Bemby Joviko, S.H., M.A.P. NIP.199308232019031004 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1122/DJA/SK.KP4.1.3/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025.

C. PROMOSI

Pada tahun 2025 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, ada 3 (tiga) orang Pegawai yang mendapatkan Promosi sebagai berikut :

Frislyasi, S.H.I. NIP. 197012051994012001 dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Berdasarkan SK Dirjen Badilag No. 1547/DJA/SK.KP4.1.3/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025

Segah Kusuma Dani, S.H. NIP. 198606062009121002 dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang Kelas II Berdasarkan SK Dirjen Badilag No . 1504/DJA/SK.KP4.1.3/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025.

Azmi Fuadi, S.H. NIP. 198903102011011003 dari Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pulang Pisau Kelas II Berdasarkan SK Dirjen Badilag No. 822/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025.

D. PENSIUN/PEMBERHENTIAN

Pada tahun 2025 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, tidak ada Pegawai yang mencapai batas usia pensiun

E. DIKLAT

Pada tahun 2025 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, ada 5 (lima) orang Pegawai yang mengikuti Diklat yaitu :

- **MUHAMMAD NAUFAL NADA SILMA, S.H.** yang mengikuti kegiatan Pelatihan Dan Sertifikasi Bendahara Penerimaan pada tanggal 16 s.d 17 Oktober 2025.
- **AUFA BASKORO AJI, S.H**. yang mengikuti kegiatan Pelatihan Dan Sertifikasi Bendahara Penerimaan pada tanggal 20 s.d 21 November 2025.
- **FAWWAS AUFAA TAQIYYAH PRASTIWI, S.H.** yang mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 8 September 2025 s.d 5 Desember 2025.
- **TANIYA SETIARNI PUTRI, S.H.** yang mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 8 September 2025 s.d 5 Desember 2025.
- **ANIS WIJI ASTUTI, S.T.** yang mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 8 September 2025 s.d 5 Desember 2025.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

"Fondasi Operasional untuk Peradilan yang Modern dan Akuntabel"

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025







PENGELOLAAN KEUANGAN

1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya meliputi *belanja pegawai, belanja barang operasional dan pemeliharaan, serta belanja non-operasional*. Pengelolaan anggaran tersebut dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang sekaligus merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara itu, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dijabat oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala, mengingat jabatan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan hingga akhir tahun anggaran masih belum terisi. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan didukung oleh seorang Bendahara Pengeluaran dan dua orang staf. Tim ini bertugas menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) selama satu tahun anggaran yang dibagi ke dalam rencana bulanan, dan disusun pada awal tahun anggaran.

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2025, perencanaan kegiatan pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) yang dirangkap oleh Pejabat Fungsional selaku Plt. Kepala Subbagian PTIP. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan sumber pembiayaan yang berasal dari satu DIPA, yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.402437/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan Pagu Rp. 3.464.334.000,-, hingga Revisi ke-14 Nomor: SP DIPA-005.01.2.402437/2025 tanggal 01 Desember 2025 dengan Pagu revisi Rp. 3.534.008.000,-.



Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen

01. Belanja Pegawai

Uraian/Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
511111 Beban Gaji PNS	861.177.000	858.175.700	3.001.300	99,65%
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000	13.514	5.486	71,13%
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	46.830.000	46.494.770	335.230	99,28%
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	13.268.000	11.944.680	1.323.320	90,03%
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	21.280.000	21.280.000	0	100,00%
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	39.910.000	37.050.000	2.860.000	92,83%
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	5.730.000	4.655.197	1.074.803	81,24%
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	42.337.000	40.193.100	2.143.900	94,94%
511129 Belanja Uang Makan PNS	157.826.000	154.240.000	3.586.000	97,73%
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	20.475.000	20.475.000	0	100,00%
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	62.100.000	62.100.000	0	100,00%
511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	170.430.000	155.953.195	14.476.805	91,51%
511339 Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	1.029.300.000	1.027.200.000	2.100.000	99,80%
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	75.134.000	73.090.400	2.043.600	97,28%
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.000	1.500	1.500	50,00%
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.020.000	4.018.400	1.600	99,96%
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.206.000	1.205.520	480	99,96%
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.925.000	4.924.560	440	99,99%
511628 Belanja Uang Makan PPPK	24.150.000	20.639.000	3.511.000	85,46%
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	5.200.000	5.060.000	140.000	97,31%
GAJI DAN TUNJANGAN	**2.585.320.000**	**2.548.713.536**	**36.605.464**	**98,58**

Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen

02. Belanja Operasional Dan Pemeliharaan Kantor

Uraian/Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	434.334.000	430.717.054	3.616.946	99,17%
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500.000	310.500	189.500	62,10%
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49.750.000	49.750.000	0	100%
521211 Belanja Bahan	300.000	300.000	0	100%
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.000	700.000	0	100%
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54.302.000	54.292.450	9.550	99,98%
522112 Belanja Langganan Telepon	1.000	0	1.000	0%
522141 Belanja Sewa	33.953.000	33.926.250	26.750	99,92%
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	122.995.000	122.975.000	20.000	99,82%
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	25.800.000	25.761.989	38.011	99,85%
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	126.593.000	126.160.071	432.929	99,66%
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.800.000	34.549.861	250.139	99,28%
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	883.028.000	878.443.175	4.584.825	99,48

03. Belanja Non Operasional

Uraian/Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
521252 Belanja Peralatan Dan Mesin - Ekstrakomptabel Layanan Umum (000081 Kursi)	700.000	700.000	0	100%
521211 Belanja bahan - Pemantauan dan Evaluasi (000082 Bahan/Sanduk/Dokumentasi)	300.000	300.000	0	100%
NON OPERASIONAL	1.000.000	1.000.000	0	100%

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

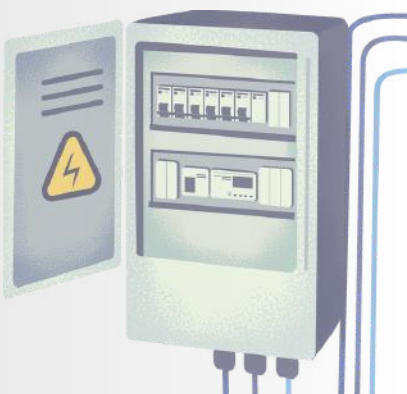
Dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI, pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah direncanakan dan dilaksanakan secara tertib dan akuntabel oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. Perencanaan tersebut meliputi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dengan keluaran (output) berupa pembangunan/renovasi gedung dan bangunan, pengadaan peralatan dan fasilitas kantor, serta perangkat pengolah data dan komunikasi.

Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BA 01) Tahun Anggaran 2025, dengan Nomor SP DIPA-005.01.2.402437/2025 tanggal 02 Desember 2024, dengan pagu awal sebesar Rp3.464.334.000,-. Selanjutnya, melalui Revisi ke-14 Nomor SP DIPA-005.01.2.402437/2025 tanggal 01 Desember 2025, pagu anggaran disesuaikan menjadi sebesar Rp64.660.000,-.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, khususnya untuk kegiatan penambahan daya listrik kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun, guna mendukung kelancaran operasional dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut disajikan secara lebih lengkap pada uraian berikut.

04. Belanja Pengadaan Sarana Dan Prasarana

Uraian/Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - 000102 Tambah Daya Listrik kantor	64.660.000	64.660.000	0	100%
PENINGKATAN SARPRAS	64.660.000	64.660.000	0	100%



3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

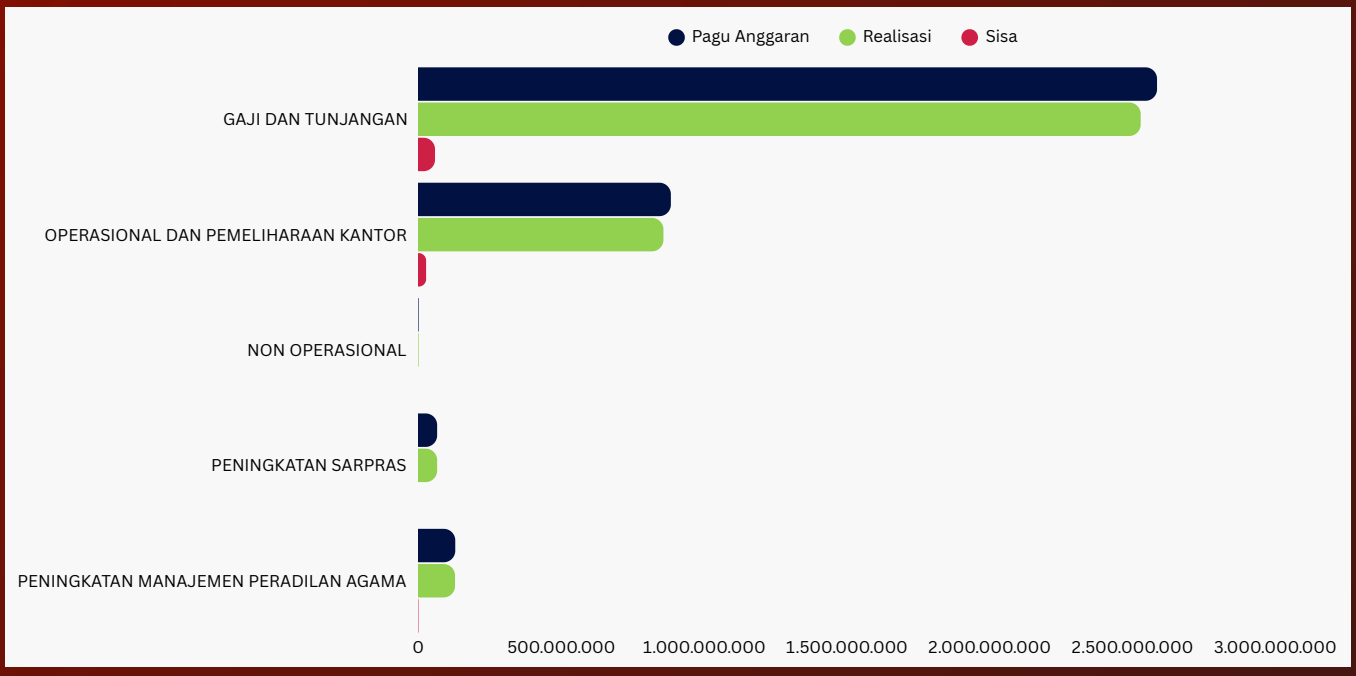
Pengelolaan keuangan pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama telah direncanakan dan dilaksanakan secara tertib dan akuntabel oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan. Perencanaan kegiatan difokuskan pada pencapaian keluaran (output) berupa pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan yang mencakup tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama, pemberian pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Sumber pembiayaan kegiatan tersebut berasal dari 1 (satu) DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2024, yaitu DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04) Nomor: SP DIPA-005.04.2.402438/2025 tanggal 02 Desember 2024, dengan total pagu anggaran sebesar Rp129.725.000,00. hingga Revisi ke-5 Nomor: SP DIPA-005.01.2.402438/2025 tanggal 15 Juli 2025 dengan Pagu revisi Rp. 128.117.000,-. Seluruh anggaran yang dialokasikan pada program ini dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun rincian realisasi anggaran disajikan sebagaimana uraian pada bagian berikut.

05. Belanja Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Uraian/Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	60.000.000	60.000.000	0	100%
Pembebasan Biaya Perkara	2.117.000	1.335.000	782.000	63,06%
Sidang Diluar Gedung pengadilan	66.000.000	66.000.000	0	100%
PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	128.117.000	127.335.000	782.000	99,39%

Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2025



Adapun pertanggung jawabanpelaksanaan anggaran meliputi:

1. Penertiban administrasi pelaksanaan anggaran.
2. Penertiban bukti-bukti yang sah.
3. Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.
4. Melaporkan pelaksanaan keuangan meliputi : Laporan Bulanan (Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Laporan Realisasi Menurut Program); Laporan Triwulan; Laporan Keuangan (Semester I dan II); Laporan Pemeriksaan Kas Bendahara; Laporan Bulanan Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Sistem Informasi PNBP Online; Laporan Pajak (eSPT) dan Laporan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).



PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

01. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG BANGUNAN

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB hingga saat ini belum sepenuhnya memenuhi prototipe standar bangunan peradilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meskipun demikian, secara visual dan fungsional gedung tersebut tetap merepresentasikan kewibawaan lembaga peradilan. Hal ini tercermin dari keberadaan empat pilar kokoh yang berdiri tegak pada bagian depan gedung, yang melambangkan keteguhan dan integritas lembaga peradilan serta komitmen para hakim dan aparatur peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun berada di Jalan Pasir Panjang KM 5,5 dibangun di atas sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 m^2 dengan luas bangunan mencapai 600 m^2. Tanah tersebut telah memiliki sertifikat Hak Pakai Nomor 00217 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kejelasan status kepemilikan tanah ini memberikan kepastian hukum serta menjadi landasan yang kuat dalam pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana peradilan di masa mendatang.

Secara konstruksi, Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun merupakan bangunan permanen dengan luas 600 m^2 yang terdiri atas 15 (lima belas) ruangan. Ruangan-ruangan tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan, baik di bidang teknis yudisial maupun administrasi perkantoran. Di dalamnya terdapat 1 (satu) ruang sidang yang digunakan untuk pelaksanaan persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembangunan gedung ini telah dilaksanakan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 227/SIMB/IX/PEM/2006.



Dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini, Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB senantiasa berupaya melakukan pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan gedung guna mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

02. SARANA DAN PRASARANA RUMAH DINAS

Pengadilan Agama Pangkalan Bun memiliki 3 Unit Rumah Dinas Tipe A Permanen yang berada dalam 1(Satu) Area dengan Gedung Kantor Utama. Adapun luas masing-masing bangunan 70 M2, 70 M2, dan 60 M2 sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 226/SIMB/IX/PEM/2006 tanggal 19 September 2006.



Rumah Dinas Ketua



Rumah Dinas Wakil Ketua



Rumah Dinas Panitera

03. SARANA DAN PRASARANA KENDARAAN RODA 4

Untuk menopangjalannya operasional perkantoran Pengadilan Agama Pangkalan Bun memiliki Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 2 (dua) buah dengan status hak milik dan 1 (satu) buah dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat.

No	Merk	Tahun Perolehan	No.Polisi	Status	Pemakai
1	Toyota Innova G	2010	KH 16 GU	Pembelian	Operasional Kantor
2	Toyota Innova	2015	KH 1452 GU	Pinjam Pakai dari Pemda Kobar	Wakil Ketua
3	Toyota Innova	2024	KH 1725 GU	Pembelian	Ketua







04. SARANA DAN PRASARANA KENDARAAN RODA 2

Guna menunjang keperluan sehari-hari perkantoran. Pengadilan Agama Pangkalan Bun juga memiliki Kendaraan Roda 2 sebanyak 3 (tiga) buah.

No	Merk	Tahun Perolehan	No.Polisi	Status	Pemakai
1	Honda Supra X 125	2006	KH 2385 GY	Pembelian	Pegawai
2	Honda Supra X 125 cc Cakram	2006	KH 2384 GY	Pembelian	Pegawai
3	Honda Supra	2012	KH 5034 GY	Pembelian	Pegawai

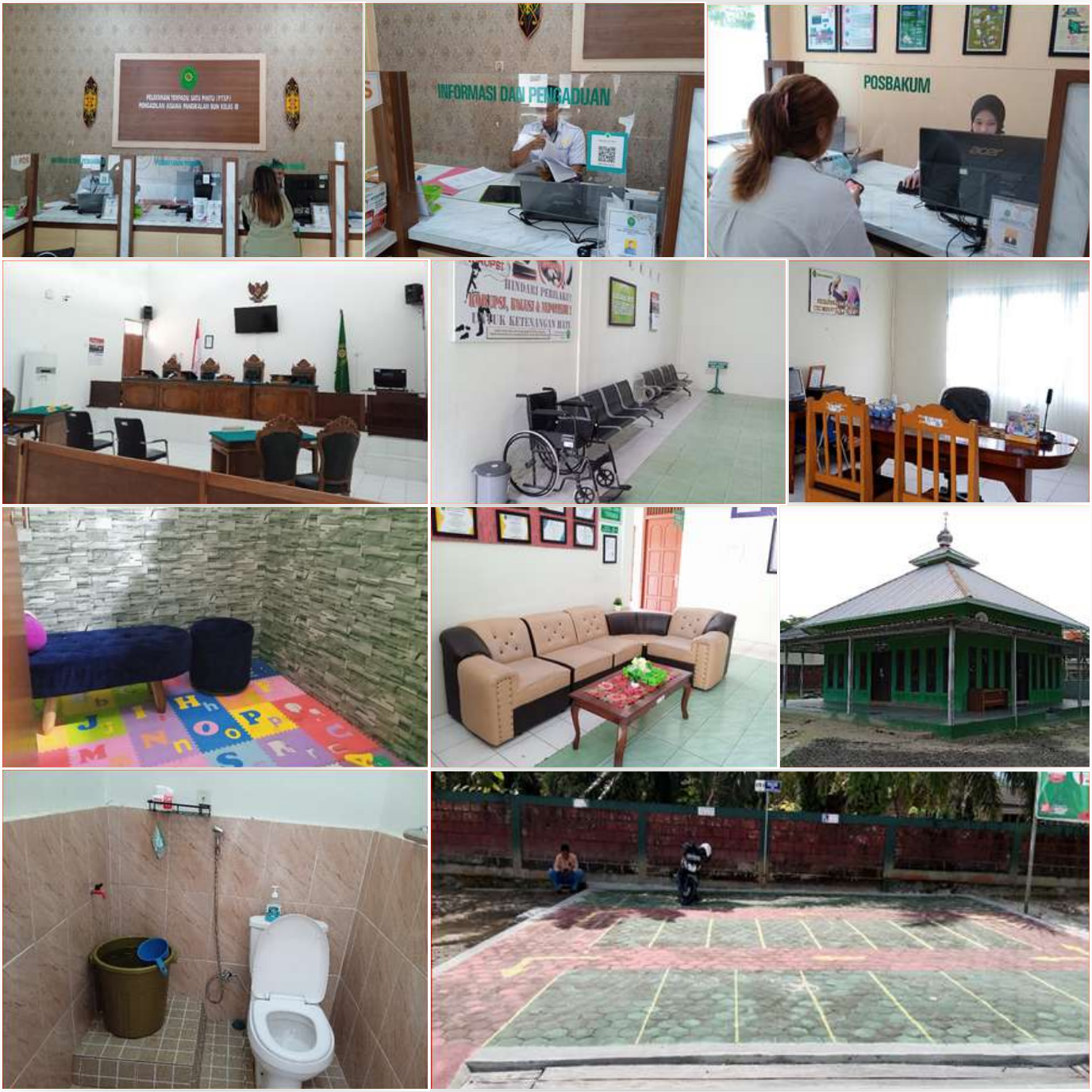






05. SARANA PRASARANA PENUNJANG PELAYANAN

Berikut sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan Tupoksi di Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang terkait dengan Pelayanan Publik sebagai berikut



Selain ruangan-ruangan tersebut ada juga fasilitas yang disediakan untuk pelayanan publik, yaitu sebagai berikut Kursi Roda untuk Penyandang Disabilitas; Parkir khusus untuk Penyandang Disabilitas; Pojok Baca; Mesin EDC, Fasilitas Charger Handphone Gratis; Mesin Antrian Sidang; TV Media; Loker Tempat Penitipan Barang; Fasilitas Air Minum Gratis; Fasilitas Wifi Gratis; Fasilitas Kompensasi Layanan.

06. SARANA PRASARANA FASILITAS GEDUNG

PENGADAAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanakan kegiatan belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, khususnya untuk kegiatan penambahan daya listrik kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun, guna mendukung kelancaran operasional dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan sesuai Nomor SP DIPA-005.01.2.402437/2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp64.660.000,-

PEMELIHARAAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA dengan realisasi meliputi Pemeliharaan Gedungdan Halaman Kantor; Pemeliharaan Rumah Dinas dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua, pemeliharaan PC, Laptop, Printer, Genset, Air Conditioner dan lain-lain.

PENGHAPUSAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Agama Pangkalan Bun sudah mengajukan Penghapusan barang-barang melalui mekanisme lelang melalui KPKNL sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana tersebut terdiri dari Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat dalam Aplikasi Sakti dan SIMAN. Serta dekorum ruangan pelayanan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana lebih terpantau dan terukur agar sasaran dan mutu dapat tercapai. Adapun pengelolaan sarana dan prasarana pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Keadaan Sarana Prasarana Gedung

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	**Sarana/Prasarana Gedung**		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Tamu Ketua	1	
4	Ruang Hakim	1	
5	Ruang Panitera	1	
6	Ruang Sekretaris	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Mediasi	1	
10	Ruang PTSP	1	
11	Ruang Sidang	2	
12	Ruang Posbakum	1	
13	Ruang Server/IT	1	
14	Ruang Tamu Terbuka	1	
15	Ruang Laktasi/Bermain Anak	1	
16	Ruang Perpustakaan	1	
17	Ruang Arsip Perkara	1	
18	Ruang Tunggu Pengacara	1	
19	Mushola	1	
20	Gudang	1	
21	Pantry	1	
22	Ruang Penerima Tamu (Resepsionis)	1	
23	Ruang Tamu Terbuka	1	

Keadaan Fasilitas Perkantoran

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
II	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran**		
1	Gerobak Dorong	-	
2	Mesin Ketik	-	
3	Lemari Besi Metal	3	Baik
4	Lemari Kayu	15	Baik
5	Rak Kayu	-	
6	Filling Cabinet Besi	-	
7	Brandkas	2	Baik
8	Tabung Pemadam Api	5	-
9	CCTV	2	Baik
10	Papan Visual/Papan Nama	5	Baik
11	White Board	2	Baik
12	Mesin Absensi	1	Baik
13	Infocus	1	-
14	Mesin Antrian Sidang	-	-
15	Meja Kerja Kayu	38	Baik
16	Kursi Besi/Metal	43	Baik
17	Kursi Kayu	10	Baik
18	Sice	5	Rusak Berat 1
19	Bangku Panjang Besi/Metal	14	Rusak Ringan 1
20	Bangku Panjang Kayu	-	-
21	Meja Rapat	1	Baik
22	Meja Komputer	-	-
23	Meja Telepon	-	-

Keadaan Fasilitas Perkantoran

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
II	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran**		
24	Meja Resepsionis	1	Baik
25	Kasur/Spring Bed	2	Baik
26	Sketsel	-	-
27	Kursi Fiber Glas/Plastik	36	Baik
28	Meubeler Lainnya	-	-
29	Jam Elektronik	3	Rusak Berat
30	Control Clock	-	-
31	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
32	A.C. Split	14	Rusak Berat 1
33	Portable Air Cinditioner	2	Baik
34	Kipas Angin	2	Rusak Berat 1
35	Televisi	6	Rusak Berat 1
36	Tape Recorder	-	-
37	Sound System	1	Rusak Berat 1
38	Microphone	3	Baik
39	Lambang Garuda Pancasila	2	Rusak Berat 2
40	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Rusak Berat 1
41	Tiang Bendera	2	Rusak Berat 2
42	Kaca Hias	2	-
43	Dispenser	3	-
44	Mimbar/podium	-	-
45	Palu Sidang	2	-
46	Lambang Instansi	1	Baik

Keadaan Fasilitas Perkantoran

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
II	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran**		
47	Karpet	-	-
48	Gordyn/Kray	-	-
49	Receiver Vhf/fm	-	-
50	Camera Digital	1	Baik
51	LCD Monitor	1	Baik
52	Pesawat Telephone	-	-
53	Faximile	-	-
54	Genset	1	Baik
55	Kursi Dorong	1	Baik
56	UPS	9	Baik
57	Komputer Jaringan Lainnya	2	Rusak Berat 1
58	P.C. Unit	46	Baik 26 Rusak Berat 20
59	Laptop	25	Rusak Berat 8
60	Printer	22	Rusak Ringan 1 Rusak Berat 5
61	Scanner	5	-
62	Server	5	-
63	Router	2	-
64	Hub	-	-
65	Modem	1	-
66	Peralatan Jaringan Lainnya	-	-
67	Rak Server	4	-
68	Kiosk Touchscren (Vestouch I Kiosk)	-	-

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan teknologi informasi di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka modernisasi peradilan dan reformasi birokrasi. Pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

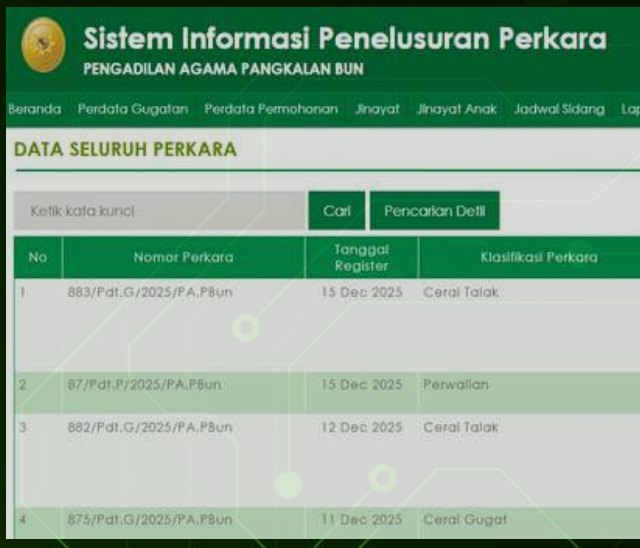
01. IMPLEMENTASI E-COURT



Penerapan layanan e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan Agama Pangkalan Bun merupakan tindak lanjut kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Melalui sistem e-Court, para pihak dapat melakukan pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran panjar biaya perkara (e-Payment), serta menerima panggilan sidang secara elektronik (e-Summons). Selanjutnya, penerapan e-Litigasi memungkinkan proses persidangan dilaksanakan secara elektronik, meliputi penyampaian jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Implementasi e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan Agama Pangkalan Bun memberikan dampak positif terhadap percepatan penyelesaian perkara, efisiensi biaya, serta peningkatan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat dengan keterbatasan jarak dan waktu.

02. IMPLEMENTASI SIPP



Dalam rangka menjamin terselenggaranya administrasi peradilan yang tertib, modern, dan akuntabel, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan kebijakan penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai sistem administrasi perkara terintegrasi di seluruh badan peradilan. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah mengimplementasikan SIPP sejak tahun 2015, dimulai dari penggunaan SIPP versi 3.1.1 dan terus mengikuti pengembangan sistem hingga menggunakan SIPP versi terbaru 5.6.4. Melalui SIPP, seluruh tahapan administrasi perkara dikelola secara terintegrasi, mulai dari pendaftaran perkara oleh petugas Meja I, pengelolaan persidangan oleh majelis hakim dan panitera pengganti, hingga minutasi dan pengarsipan oleh petugas Meja III. Setiap aparatur peradilan mengelola data sesuai kewenangan melalui akun pengguna masing-masing, sehingga keakuratan, validitas, dan keterbaruan data perkara dapat terjaga dengan baik.

03. PELAKSANAAN Program One Day One Minute dan One Day One Publish

Sebagai bagian dari upaya percepatan administrasi perkara dan keterbukaan informasi publik, Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara konsisten melaksanakan program one day one minute dan one day one publish. Program ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut kebijakan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terkait percepatan minutasi dan publikasi putusan pengadilan.

Melalui program tersebut, minutasi perkara diselesaikan tepat waktu dan putusan dipublikasikan secara cepat melalui sistem informasi pengadilan. Pelaksanaan program ini mendukung terwujudnya transparansi peradilan serta memberikan kemudahan akses informasi perkara bagi masyarakat.

04. IMPLEMENTASI Elektronik Akta Cerai (EAC)

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi perkara perceraian, Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah mengimplementasikan Elektronik Akta Cerai (EAC). Penerapan EAC mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai secara Elektronik.

Melalui EAC, penerbitan akta cerai dilakukan secara elektronik, terintegrasi dengan SIPP, serta dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan kode verifikasi guna menjamin keaslian dokumen. Implementasi EAC mempercepat proses penerbitan akta cerai, meningkatkan keamanan arsip, serta mendukung kebijakan pengurangan penggunaan kertas (paperless administration).

05. Dukungan Infrastruktur dan pengembangan SDM TI

Untuk mendukung optimalisasi penerapan teknologi informasi, Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara berkelanjutan melakukan pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, meliputi jaringan internet, perangkat keras, dan perangkat lunak. Pengelolaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar dan kebijakan teknologi informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur peradilan di bidang teknologi informasi terus didorong melalui pembinaan internal dan penguatan pemahaman sistem, sehingga seluruh aplikasi dapat dioperasikan secara profesional, aman, dan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.



BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

"Transformasi Layanan Menuju Peradilan Modern."

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025







PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada tingkat pertama sudah seharusnya memiliki standar pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan aturan yang berlaku di era teknologi informasi dan perkembangan zaman.

Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama/MahkamahSyar'iyah merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/ MahkamahSyar'iyah setelah memenuh ikriteria penilaian Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar Sistem Manajemen Mutu yang berlaku berdasarkan rekomendasi auditor pada pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu di lapangan.

Langkah awal untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu (APM), Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun membentuk Tim Penjamin Mutu yang tertuang dalam SK Nomor : W16-A2/767/OT.01.3/IX/2021 Tanggal 12 September 2021 tentang Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas I B. Kemudian langkah selanjutnya setiap anggota tim mempersiapkan dokumen telusur yang telah ditetapkan sebagai standar untuk penilaian kelengkapan berkas yang sesuai dengan pedoman APM yang kemudian dilakukan upload dokumen eviden ke aplikasi PMPAPM Badilag.

Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Bun patut bersyukur telah melaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2021 dan Sampai saat ini Akreditasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun masih mengacu sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020 bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah **terakreditasi " A " Excellent.**

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan birokrasi yang modern, sederhana, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menetapkan PTSP sebagai model layanan yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses bagi para pencari keadilan.

Implementasi PTSP ini ditegaskan melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI No: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama. Dalam pedoman tersebut, PTSP didefinisikan sebagai sistem pelayanan administrasi peradilan yang terintegrasi dalam satu alur proses, mulai dari permohonan informasi, penyampaian pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga pengambilan produk pengadilan semuanya dilaksanakan melalui satu pintu pelayanan yang tertata dan terkontrol.

Pengadilan Agama Pangkalan Bun sejak awal berdirinya telah berkomitmen menerapkan PTSP sebagai wajah utama pelayanan publik lembaga peradilan. Dengan memaksimalkan fasilitas dan ruang yang tersedia, PA Pangkalan Bun berupaya menghadirkan layanan yang mudah diakses, ramah pengguna, dan responsif, meskipun beberapa standar layanan fisik yang ditetapkan oleh Dirjen Badilag belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena keterbatasan ruang yang ada.



"Di balik satu pintu pelayanan, kami mengetuk pintu keberkahan ~ mewujudkan layanan yang tertib, jujur dan penuh adab."

Pengadilan Agama pangkalan Bun Raih 20 Prestasi Kinerja

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 MENEGASKAN KOMITMEN PA PANGKALAN BUN DALAM PELAYANAN PERADILAN YANG EFEKTIF, INKLUSIF DAN BERINTEGRITAS. DIDUKUNG KONSISTENSI PENYELESAIAN PERKARA SERTA OPTIMALISASI PROGRAM PRIORITAS.



“Prestasi adalah hasil dari komitmen bersama untuk melayani dengan integritas.”

PADUKAN VISI DAN RAIH PRESTASI



INDEKS HASIL SURVEY

PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN
TAHUN 2025

3.92
Indeks Kepuasan Masyarakat

3.92
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

3.93
Indeks Persepsi Anti Korupsi

608 Total Responden

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan wujud nyata komitmen Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di era modern saat ini, pelayanan publik tidak hanya dituntut untuk cepat dan tepat, tetapi juga harus transparan, mudah diakses, serta mampu memberikan pengalaman pelayanan yang prima bagi setiap pencari keadilan. Prinsip inilah yang menjadi landasan bagi Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam menghadirkan layanan yang tidak sekadar administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai profesionalitas dan integritas.

Untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut, Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah memperkuat sistem layanannya dengan dukungan teknologi informasi yang memadai. Infrastruktur jaringan berbasis fiber optic dengan kecepatan mencapai 100 Mbps menjadi tulang punggung kelancaran proses pelayanan digital. Kecepatan dan stabilitas jaringan ini memastikan seluruh transaksi data, baik administrasi perkara maupun layanan informasi publik, dapat diproses tanpa hambatan—memberikan rasa aman, nyaman, dan efisien bagi setiap pengguna layanan. Dengan dukungan infrastruktur yang kuat, para pencari keadilan tidak hanya mendapatkan kepastian, tetapi juga kehandalan dalam setiap interaksi pelayanan.

Selain infrastruktur jaringan, kualitas pelayanan juga diperkuat melalui penggunaan berbagai aplikasi layanan yang telah distandardisasi secara nasional oleh Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Aplikasi-aplikasi tersebut menjadi instrumen penting yang mempermudah proses administrasi, mempercepat alur kerja, dan menjaga akurasi data sehingga setiap tahapan pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Mulai dari aplikasi pendaftaran perkara, layanan informasi perkara, hingga sistem pengaduan dan layanan administrasi lainnya—seluruhnya dirancang untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik, akuntabel, serta sesuai standar pelayanan yang ditetapkan secara nasional.

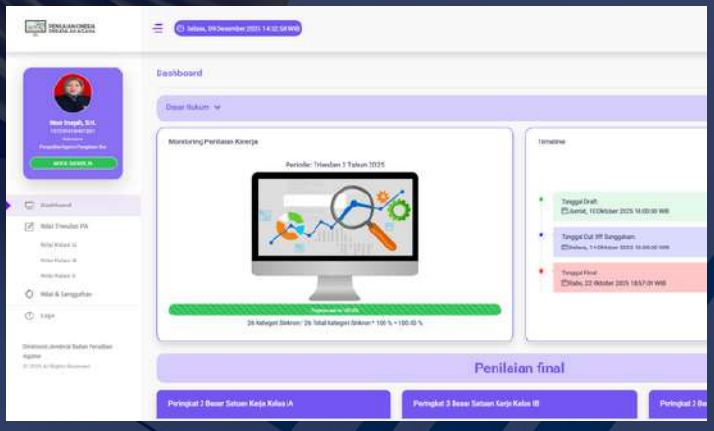
Dengan kombinasi antara infrastruktur teknologi yang kuat dan sistem aplikasi yang terintegrasi, Pengadilan Agama Pangkalan Bun senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dari tahun ke tahun. Upaya ini bukan hanya mencerminkan pemenuhan kewajiban institusi pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen moral untuk menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan selaras dengan semangat reformasi birokrasi dalam mewujudkan peradilan yang modern, profesional, dan terpercaya.


eCourt Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System
e - Court
The Electronics Justice System
Home
Tentang e-Court
Layanan
Partner
Keanggotaan
Peta eCourt
Hubungi
FAQ
e-Court Mahkamah Agung RI
e-Filing | e-Payment | e-Summons | e-Litigation
Login
Register Pengguna Terdaftar (Untuk Advokat)
Register Kurator
Syarat dan Ketentuan


EAC
ELEKTRONIK AKTA CERAI
Login Pemohon
Username
Username/NIK
Password
Password


KINSATKER
HUBUNGI KAMI
PUSAT DATA PERKARA
LOGIN
e-LAPORAN
E - MONITORING
Validasi & Verifikasi
E-PENILAIAN
Login
Lupa Password
MAHKAMAH AGUNG


Search
SATUAN KERJA
SURAT KEPUTUSAN
TIM PENGAWAS
PERSENTASE
AKSI


Dashboard
Monitoring Penilaian Kinerja
Penilaian final

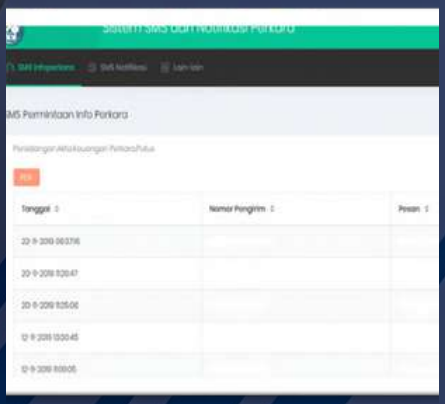

Penilaian Kinerja Triwulan
SURVELAG
Survei Badilag
EAC
Elektronik Akta Cerai
SIGNAL
Sistem Informasi Layanan Pegawai Internal
Izin Keluar Negeri (Non Teknis)
Simtalak
SIMTEPA
Sistem Informasi Manjemen Tenaga Teknis Peradilan Agama
ACO
Access CCTV Online
Access CCTV Online
SIPINTAR

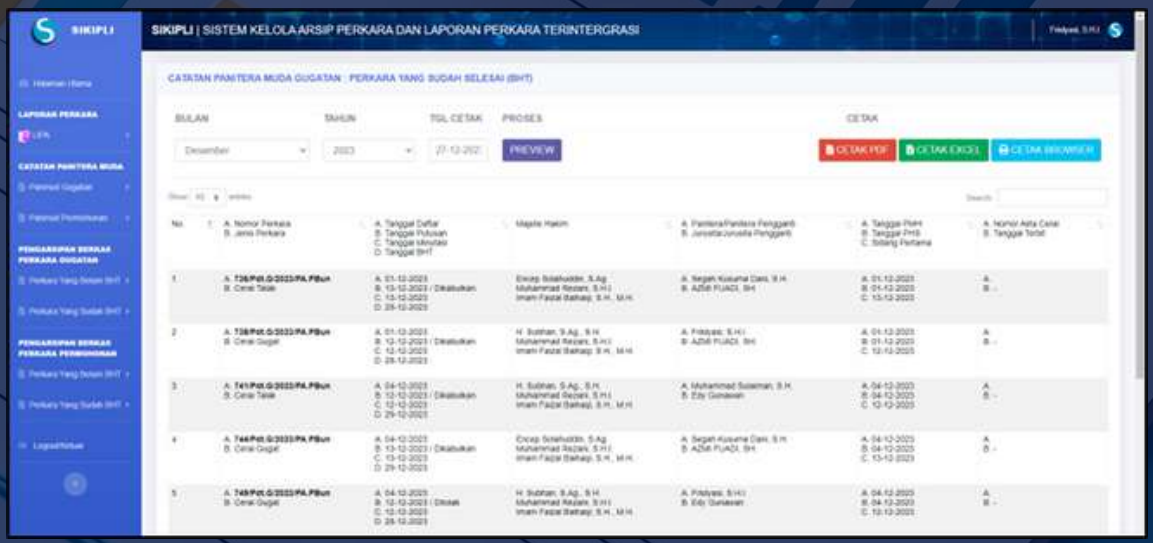

Aplikasi Antrian Sidang & PTSP
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN
DAFTAR ANTRIAN SIDANG HARI INI : SELASA, 09 DESEMBER 2025 - 14:58:30
Beranda
Registrasi
R. Sidang 1
R. Sidang 2
Mediasi
e-Court
Pendaftaran
Kasir
Produk
P o s
Bank
Posbakum
Laporan Sidang
Laporan PTSP
Notifikasi
Status
1. 848/Pdt.G/2025/PA.PBun - CERAI GUGAT
Ruang Sidang 1
P - JUMAYATI BINTI ANANG RANI
T - MISRANTO BIN M. DRAJAD
2. 689/Pdt.G/2025/PA.PBun - CERAI TALAK
Ruang Sidang 1
P - SAMSUL HADI BIN SANUSI
T - SUMIATI BINTI KUSNOTO
3. 722/Pdt.G/2025/PA.PBun - CERAI TALAK
Ruang Sidang 1
P - RONI INDRA WIYANTO, SE BIN PARJO
T - LAILA, SE BINTI AN. SYAHRANI

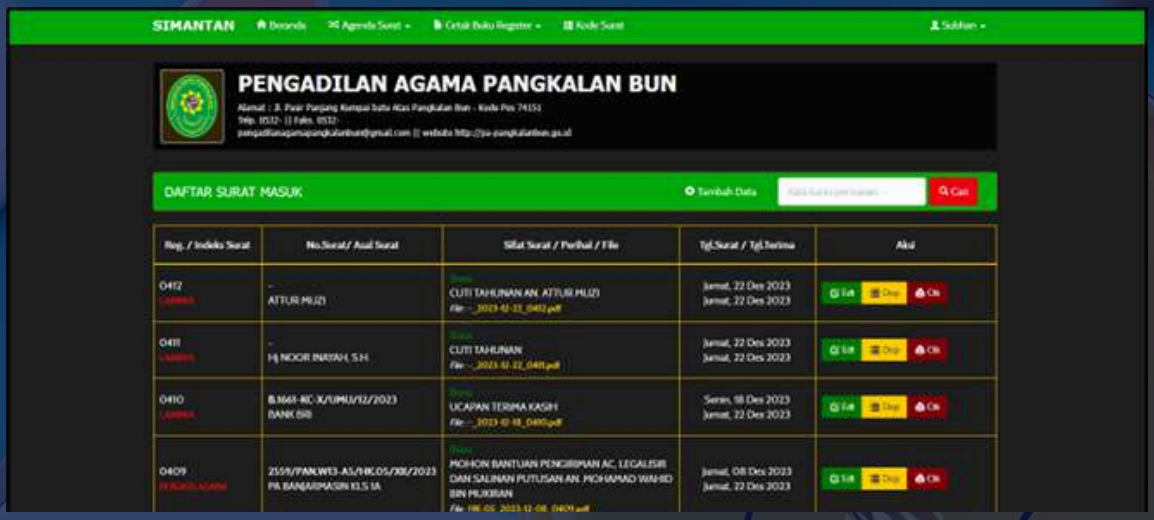

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN
Nama pengguna atau email
Kata Sandi
Masuk
BANK DATA
PA PANGKALAN BUN


E-REGISTER
E-KEUANGAN
BLANGKO TAMBAHAN SIPP
E-PELAPORAN
SIPERDI
CEK AKTA
e-BUNDLING
E A C
APS BADILAG Versi 3.25
copyright © 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Buku Panduan Penggunaan || Catatan Update


Aplikasi Blangko Terintegrasi SIPP (ABT SIPP)
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN
Beranda
Pengaturan
Tentang
01 Putusan Umum
02 RELAAS
03 AMPLOP
04 Berita Acara Sidang (BAS)
05 Instrumen
06 Penyelesaian Perkara
07 Pendaftaran G
08 Pendaftaran P
Akta Cerai
Blangko Utama
IN - Sidang Keliling
IN_Pendaftaran
IN_Penetapan
Instrumen dan Court Calander
Pendaftaran G
Penetapan PAPBUN
Penyelesaian Perkara
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN
Jl.Pasir Panjang Kumpai Batu Atas Km. 5,5
Perhatian : LENGKAPI DATA ISIAN PADA SIPP TERLEBIH DAHULU

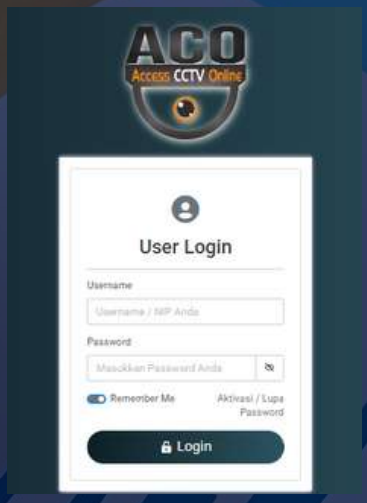



SIKIPLI
SIKIPLI | SISTEM KELOLA ARSIP PERKARA DAN LAPORAN PERKARA TERINTERGRASI
CATATAN PANITERA MUDA GUGATAN : PERKARA YANG SUDAH SELESAI (BHT)
BULAN
TAHUN
TGL CETAK
PROSES
CETAK
PREVIEW
CETAK PDF
CETAK EXCEL
CETAK BROWSER


SIMANTAN
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN
DAFTAR SURAT MASUK


E-GUIDANCE
SELAMAT DATANG DI WEBSITE E-GUIDANCE


PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN
Jl.Pasir Panjang Kumpai Batu Atas Km. 5,5
Dokumen Elektronik SIPP Peradilan Agama (DESPA)
-->> DAFTAR SELENGKAPNYA <<--
PENCARIAN ARSIP PERKARA :
- Nama Pihak Berperkara
- Nomor Perkara
- Jenis Perkara
CARI DATA
-->> DAFTAR PUBLIKASI PUTUSAN <<--


ACO
Access CCTV Online
User Login
Username
Password
Remember Me
Aktivasi / Lupa Password
Login


SIMANTAP
Sistem Informasi Manajemen Aset dan Tindak Administrasi Pelaporan IT
BERANDA
FORM PENGAJUAN
MASUK
Pengaduan Kerusakan Barang IT?
Jangan ambil pusing! Sampaikan kepada kami.
Cek status pengaduan Pian
Masukkan nomor pengaduan Pian disini
Cek
atau ajukan pengaduan Pian
Disini
Create By Klerek - Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor

VALIDASI AKTA CERAI - PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Nomor Akta Cerai	Tanggal Terbit Akta Cerai	Nama Pemohon/Penggugat	Tanggal Penyerahan AC kepada (P)	Nama Termohon/Tergugat	Tanggal Penyerahan AC kepada (T)
1	655/Pdt.G/2023/PA.Pbun	Cerai Gugat	0517/AC/2023/PA.Pbun	2023-11-22	DIAH ROSMASIH binti WARDIANTO	2023-12-04	DEDY KURNIACHI bin SUKARIN KUSMARDIYI	Belum di antar
2	556/Pdt.G/2023/PA.Pbun	Cerai Gugat	0471/AC/2023/PA.Pbun	2023-10-30	EKA SURYANI BINTI AMAD SUPARMAN	2023-11-06	S. HARYONO BIN SOEMARDJO	Belum di antar
3	558/Pdt.G/2023/PA.Pbun	Cerai Gugat	0436/AC/2023/PA.Pbun	2023-10-06	Septiana Kurnia Dewi Binti Sapi'i	2023-10-10	Dwi Purwanto Bin Wahyu Purwanto	Belum di antar
4	557/Pdt.G/2023/PA.Pbun	Cerai Gugat	0446/AC/2023/PA.Pbun	2023-10-11	Irnawati Binti M. Karnadi	2023-11-27	Sri Handi Bin Kaudi	Belum di antar
5	556/Pdt.G/2023/PA.Pbun	Cerai Gugat	0432/AC/2023/PA.Pbun	2023-10-04	Baidatul Rijalah binti H. Isham HM	2023-11-13	Sandi Irawan bin Madnadi	Belum di antar
6	555/Pdt.G/2023/PA.Pbun	Cerai Gugat	0458/AC/2023/PA.Pbun	2023-10-24	Lilip Puji Setia binti Muraji	2023-11-01	Agung bin Suyadi	Belum di antar
7	554/Pdt.G/2023/PA.Pbun	Cerai Gugat	0416/AC/2023/PA.Pbun	2023-09-22	Dena Amelia binti M. Husni	2023-11-01	Eli Erma Wanisyah bin Mustafa	Belum di antar
8	553/Pdt.G/2023/PA.Pbun	Cerai Gugat	0417/AC/2023/PA.Pbun	2023-09-22	Devi Ardiyati Saputri binti Supardi	2023-10-10	Rifadi Oktafian bin Budi Prasetyo	2023-12-06
9	550/Pdt.G/2023/PA.Pbun	Cerai Gugat	0402/AC/2023/PA.Pbun	2023-09-19	Yuliana binti Samsiar	2023-11-24	Ardiani bin Masturi	Belum di antar
10	455/Pdt.G/2023/PA.Pbun	Cerai Talak	0381/AC/2023/PA.Pbun	2023-09-05	Abdul Rahman bin Dasma	2023-09-05	Wiwik binti Sartoyo	2023-09-05





BAB VI
PENGAWASAN

"Mengawal Akuntabilitas, Menjaga Kepercayaan."

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025







PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparat Peradilan Agama yang berkualitas bersih dan berwibawa maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun melakukan pengawasan meliputi :

PENGAWASAN SECARA LANGSUNG :

1. Pembinaan dan pengawasan langsung dari Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam bentuk rapat koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik.
2. Pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung secara terus menerus terhadap pelaksanaan tugas bawahannya, agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan pekerjaan, sehingga semua tugas dapat dilaksanakan sesuai job description yang tertuang dalam uraian tugas masing-masing.
3. Pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran dan Kasir oleh atasan langsung yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dimana hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
4. Menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) yang bertugas mengadakan Pembinaan, baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan SK terakhir Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : 559/KPA.W16-A2/PW1.1.1/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang hasil Pengawasan dilaporkan Kepada Ketua Pangadilan Agama Pangkalan Bun untuk bahan Pembinaan dan evaluasi.
5. Pelaksanaan pengawasan bidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah menggunakan aplikasi E-binwas sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024, tanggal 23 Agustus 2024, tentang “Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) di Lingkungan Peradilan Agama”.

Adapun daftar Hakim Pengawas Bidang tersebut sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Pengkalan Bun tersebut adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM HAWASBID
1	*2*	*3*	*4*
1	H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.	Ketua PA	Pembina/Pengarah
2	Syahrul Ramadhan, S.H.I.	Wakil Ketua PA	Koordinator Hakim Pengawas
3	Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.	Hakim	Anggota / Hakim Pengawas Bidang Administrasi Peradilan dan Administrasi Perkara
4	Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I.	Hakim	Anggota / Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum
5	Abdurahman Sidik, S.H.I	Hakim	Anggota / Hakim Pengawas Bidang Manajemen

PENGAWASAN SECARA TIDAK LANGSUNG :

1. Meneliti dan mengevaluasi pembuatan konsep laporan yang dibuat oleh masing- masing unit kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas Kesekretariatan dan Kepaniteraan, kemudian memberikan petunjuk seperlunya secara tertulis.
2. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan / pemeriksaan, baik oleh HAWASBID maupun HATIBINWAS.





B. EVALUASI

Evaluasi menjadi pilar penting dalam manajemen kinerja, memastikan setiap program berjalan sesuai arah dan standar yang ditetapkan. Sepanjang 2025, Pengadilan Agama Pangkalan Bun menempatkan proses evaluasi sebagai bagian integral dalam menjaga kualitas layanan dan ketertiban administrasi.

Untuk itu, Jadwal Pembinaan dan Evaluasi Tahun 2025 sebagai pedoman bersama. Jadwal ini memungkinkan setiap unit melakukan pemantauan berkala, menindaklanjuti temuan lebih cepat, serta memperkuat akurasi pelaksanaan tugas dari tingkat teknis hingga non-teknis.

Melalui evaluasi rutin tersebut, berbagai perbaikan internal dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Hasilnya, ritme kerja satuan kerja menjadi lebih tertata, adaptif, dan akuntabel, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berada pada kualitas terbaik.



BAB VII
PENUTUP

"Akhir Narasi, Awal Komitmen Baru."

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025



PENUTUP

A. KESIMPULAN



Pada umumnya program dan rencana strategis Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana, baik yang menyangkut Pengawasan, Pembinaan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia teknis yudisial, non-teknis yudisial, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Administrasi Perkara maupun Pengelolaan Administrasi Umum, yang kesemuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan :

1. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana terurai dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dilaksanakan dengan baik, meliputi Menerima perkara sesuaidengan wewenangnya, memeriksa perkara sesuaidengan hukum acara yang berlaku, mengadili serta menyelesaikan perkara ditingkat pertamaberdasarkan Undang-undang yang belaku, memberikan fatwa Agama dan memberikan Isbat kesaksian Rukyat Hilal Awal bulan tahunHijriyah.
2. Sampai dengan 31 Desember 2025 Pengadilan Agama Pangkalan Bun menerima sebanyak 862 perkara, terdiri dari 764 perkara permohonan dan 98 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2024 sebanyak 1 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2025 berjumlah 863 perkara.
3. Pengawasan dan pembinaan Internal Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan menggunakan 2 (dua) sistem yaitu :

- Pengawasan dan pembinaan secara langsung baik melalui forum rapat koordinasi, pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda, menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID), agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan pekerjaan sehingga semua tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan Job Description yang tertuang dalam uraian tugas masing- masing.
- Pengawasan tidak langsung yaitu meneliti pembuatan konsep laporan yang dibuat oleh masing-masing unit kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas Kesekretariatan dan Kepaniteraan, kemudian memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis.
- Penggunaan aplikasi E-Binwas dalam pelaksanaan pwngawasan bidang pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sesuai arahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

4. Pembinaan dan Pengelolaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA tahun 2025.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial, baik Urusan Gugatan, Permohonan, dan Hukum agar bisa mengoperasikan Komputer dalam program jaringan aplikasi SIPP, guna mempercepat pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam pembuatan Berita Acara, Relaas Panggilan/Pemberitahuan maupun Putusan.
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Non Yudisial juga dapat terlaksana dengan baik, dalam hal ini Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah memberikan izin atau tugas bagi pegawai atau karyawan untuk mengikuti kuliah maupun mengikuti pelatihan apabila dipanggil atau ditugaskan.
7. Jabatan Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Pangkalan Bun khususnya Jabatan Panitera Muda Permohonan dan Gugatan, Panitera Pengganti, Jurusita, Kasubag. Umum dan Keuangan serta Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan hingga akhir tahun masih kosong.
8. Penyusunan program rencana penggunaan anggaran DIPA telah disusun oleh Sekretaris karena Kepala Kasubag Perancanaan IT Pelaporan masih kosong, Sedangkan pengelolaan Keuangan dikelola oleh Sekretaris Bersama Kasubag Kepegawaian dan Ortala dan Bendahara Pengeluaran karena Kepala Kasubag Umum dan Keuangan juga masih kosong

9. Dalam pengelolaan administrasi keuangan perkara yaitu ditunjuk 1 (satu) orang kasir yang mana dirangkap oleh Jurusita dan dibentuk tim pengelola biaya proses, dalam penulisan Buku Induk keuangan perkara dan buku-buku register lainnya dibantu oleh beberapa orang tenaga honorer yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Sedangkan proses perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, baik perkara gugatan maupun permohonan dilaksanakan dengan sistem meja baik meja satu, dua dan tiga, yang merupakan satu kesatuan pelaksanaan teknis administrasi perkara mulai dari penerimanan perkara sampai perkara itu di putus.
10. Pengelolaan Administrasi Umum, dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan alokasi dana DIPA yang telah dibuatsesuai program dan rencana kebutuhan kantor yang diperlukan dalam satu tahun

B. SARAN/REKOMENDASI

Mencermati evaluasi hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB tahun 2025 dan dalam upaya mengatasi permasalahan dan kendala yang ada, maka memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengupayakan peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Peradilan dengan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan pegawai secara terus menerus melalui pelatihan online guna mewujudkan aparat peradilan yang profesional (berwawasan luas, terampil, dan berakhlak mulia).
2. Mengupayakan penambahan sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga teknis Hakim, Panitera Pengganti, Kasubag Umum dan Keuangan,Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan serta tenaga pelaksana, khususnya lulusanTeknologi Informasi, Komunikasi, Perpustakaan, dan Ekonomi Akuntansi.
3. Agar memberikan tambahan tenaga administrasi/staf pada setiap Kepala Sub Bagian, dengan jalan mengangkat tenaga PNS yang telah memenuhi syarat menduduki jabatan, maupun menambah PNS/CPNS baru.

EPILOG EDITORIAL

"Menutup Lembar, Membuka Arah Baru Peradilan"



Tahun 2025 menjadi perjalanan yang **penuh dinamika bagi Pengadilan Agama Pangkalan Bun.** Tahun ketika komitmen pelayanan, integritas, dan inovasi dirangkai menjadi sebuah capaian bersama. Setiap program, pelatihan dan layanan yang dihadirkan **bukan hanya rutinitas, tetapi jejak nyata menuju peradilan yang lebih modern dan bermartabat.**

Dengan semangat ***"Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat"***, lembaga ini terus melangkah, memperbaiki diri, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Meski masih ada ruang yang perlu diperkuat, pencapaian tahun ini menjadi energi baru untuk menghadapi tantangan tahun mendatang.

Epilog ini menutup laporan 2025, namun **membuka babak baru: sebuah ajakan untuk terus menjaga integritas, melanjutkan inovasi, dan membangun peradilan yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat Kotawaringin Barat.**

TERIMAKASIH!

PHONE :
(0532) 2031118

ADDRESS :
Jln Pasir Panjang KM 5,5 Pangkalan Bun

WEBSITE :
pa-pangkalanbun.go.id

EMAIL :
pengadilanagamapangkalanbun@gmail.com

Kilas Balik Kegiatan

TAHUN 2025













Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB

Pelayanan yang semakin cepat dan humanis, inovasi digital yang memperluas akses, penyelesaian perkara yang efektif, kegiatan pembinaan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas layanan menjadi jejak perjalanan Pengadilan Agama Pangkalan Bun sepanjang tahun. Sebuah tahun penuh dedikasi untuk menghadirkan peradilan yang bermartabat.

